

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Melalui penelitian ini penulis mencoba menjawab pertanyaan apa permasalahan yang dihadapi jurnalis terkait jurnalisme lingkungan dalam memberitakan kebakaran hutan dan lahan di Riau. Berdasarkan peran media massa dan kerja jurnalisnya dalam meliput serta memberitakan masalah lingkungan khususnya kebakaran hutan yang sering terjadi di Riau, peneliti tertarik untuk melihat bagaimana *problem* atau kendala yang dihadapi jurnalis dalam memberitakan masalah lingkungan khususnya kebakaran hutan dan lahan.

Dalam penelitian ini penulis memilih surat kabar lokal yang ada di Riau. Penulis memilih media cetak tersebut karena media cetak tersebut merupakan media cetak lokal yang sudah senior di Riau yang berdiri sejak tahun 1991 dan tentunya mempunyai kedekatan dengan permasalahan lingkungan yang terjadi di Riau.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan melalui wawancara mendalam terhadap tiga jurnalis SKH Riau Pos yang *intens* meliput kebakaran hutan dan lahan di Riau dapat disimpulkan bahwa dalam memberitakan kebakaran hutan di Riau, ketiga jurnalis tersebut menghadapi beberapa kendala atau *problem* secara umum yang dihadapi jurnlis pada umumnya dalam peliputannya dan hanya satu wartawan yang memiliki *problem* yang berkaitan dengan jurnalisme lingkungan.

Dari hasil wawancara dengan ketiga jurnalis dari SKH Riau Pos yang *intens* meliput kebakaran hutan di Riau yaitu Eka Gusmadi Putra, Muhammad Ali Nurman, dan Mario di tempat dan waktu yang berbeda dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang mereka hadapi dalam memberitakan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Riau tidak jauh berbeda satu sama lain, hanya ada satu perbedaan yang dialami jurnalis tersebut. Permasalahan yang mereka hadapi berkaitan dengan jurnalisme lingkungan terkait kewajiban sebagai seorang jurnalis lingkungan dan kinerja jurnalistik.

Secara umum permasalahan yang dihadapi adalah dari segi wilayah atau lokasi kebakaran hutan dan lahan di Riau yang terlalu jauh untuk dijangkau. Untuk mencapai lokasi kebakaran tersebut membutuhkan waktu lama dan medan yang sulit untuk dilalui. Hal itu tentunya menjadi penghambat bagi wartawan untuk memperoleh berita aktual. Sehingga seperti yang dikatakan Andi Novirianti dalam penelitiannya bahwa objektivitas dan kedalaman berita yang ada di media lokal di Riau masih kurang memiliki objektivitas. Untuk mengatasi hal tersebut, agar berita-berita penting dari berbagai wilayah kebakaran itu tidak terlewatkan maka SKH Riau Pos telah mencari solusi dengan menempatkan wartawan kontributor pada setiap kabupaten dan menempatkan wartawan pada poskonya masing-masing untuk menggali lebih dalam informasi tersebut.

Masalah umum yang dihadapi tidak hanya itu saja, untuk mendapatkan data dari narasumber terkait juga ada beberapa kendala yang dihadapi oleh ketiga wartawan tersebut, meskipun tidak begitu signifikan. Hal ini

disebabkan karena ada narasumber yang terkadang tidak mau memberikan informasi atau kurang berkompeten dan sulit untuk ditemui, sehingga isi berita menjadi kurang lengkap karena menggunakan data seadanya. Namun disisi lain terlihat kemudahan wartawan dalam mendapatkan informasi terkait kebakaran hutan dan lahan di Riau. Kemudahan tersebut terlihat dari ada instansi terkait yang justru memberikan informasi dan data kepada wartawan, kemudian melakukan konfirmasi. Jika upaya konfirmasi tidak berhasil maka data seadanya yang ada ditangan wartawan tersebut yang dijadikan berita di SKH Riau Pos. Dari hal itu terlihat kedalaman informasi dalam pemberitaan tersebut menjadi kurang lengkap.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *problem* kerja atau kendala jurnalis SKH Riau Pos dalam meliput dan memberitakan kebakaran hutan dan lahan di Riau tidak memiliki *problem* kerja secara khusus dalam hal jurnanisme lingkungan. Hanya ada satu wartawan yang dalam kerja jurnalistiknya memiliki *problem* yang berhubungan dengan kendala yang dialami jurnalis lingkungan terkait kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau.

## **B. Saran**

Penelitian ini masih terdapat beberapa kelemahan. Penulis tidak bisa melakukan penelitian secara lebih efektif dan penulis kurang melakukan pendekatan dengan ketiga jurnalis yang menjadi subyek penelitian. Hal ini sangat berpengaruh pada hasil wawancara mendalam karena data yang diperoleh penulis menjadi kurang mendalam. Hal ini dikarenakan suatu faktor,

yaitu kesibukan pekerjaan mereka sebagai jurnalis, dan faktor lain yaitu peneliti belum bisa mengikuti kerja jurnalis secara langsung dengan efektif.

Penulis berharap penelitian ini dapat berguna bagi para pembacanya, civitas akademika, dan para calon peneliti yang juga berniat melanjutkan penelitian ini atau meneliti mengenai jurnalis lingkungan. Penulis berharap bagi calon peneliti berikutnya dapat melakukan penelitian dengan meneliti kelompok jurnalis lingkungan yang lebih besar dari beberapa media, baik media lokal maupun nasional.

Penelitian tersebut diharapkan dapat dilakukan dalam waktu yang lebih lama, terutama dengan observasi, sehingga dapat menghasilkan hasil penelitian yang lebih mendalam.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Abrar, Ana Nadhya.1993. *Mengenal Jurnalisme Lingkungan Hidup*. Yogyakarta:Gajah Mada University Press

Astraatmaja Atmakusumah, Maskum Iskandar dan Warief Djajanto Basorie, Penyunting. 1996. *Mengangkat Masalah Lingkungan ke Media Massa*. Jakarta: LPDS dan Yayasan Obor Indonesia.

Birowo, M. Antonius, dkk. 2004. *Metode Penelitian Komunikasi*. Yogyakarta: Gitanyali

Hester, L. Albert dan To, J. Wai Lan, Penyunting. 1997. *Pedoman Untuk Wartawan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta : Erlangga

Keraf, A. Sony. 2006. *Etika Lingkungan*. Jakarta : Penerbit Buku Kompas

Kountur, Ronny. 2003. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Dan Thesis*. Jakarta : PPM

Moleong, Lexy. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Moleong, Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya

Mulyana, Deddy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Noviriyanti, Andi. 2006. *Objektivitas Berita Lingkungan Hidup, Jurnalistik Berkelanjutan*. Riau : Yayasan Taman Karya Riau.

Nurudin. 2009. *Jurnalisme Masa Kini*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Rakhmad, Jalaludin. 1993. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Siregar, Ashadi.1998.*Bagaimana Meliput dan Menulis Berita Untuk Media Massa*. Yogyakarta: LP3Y

Sugiyono.2005.*Memahami Penelitian Kualitatif*.Bandung : Alfabeta

Sugiyono.2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta

#### **Penelitian :**

Haswari, Aninda.2010. *Jurnalisme Lingkungan Dalam Pemberitaan Seputar Eksploitasi Hutan di Indonesia Pada SKH Kompas April-Mei 2010*.Yogyakarta.Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Paulina,Elizabeth.2010. *Jurnalisme Lingkungan Surat Kabar Indonesia: Studi Analisis Isi Pemberitaan Bencana Pergerakan Tanah Jawa Barat Pada Surat Kabar Kompas dan Pikiran Rakyat Periode Februari-Maret 2010*.Yogyakarta.Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

#### **Artikel Online**

<http://m.riapos.co/33685-berita--mengurai-masalah-secara-komprehensif.html>

(diakses 10 September 2013).

[www.riapos.co](http://www.riapos.co) (diakses 10 September 2013)

## Interview Guide

Dalam penelitian kualitatif ini metode utama yang digunakan adalah wawancara mendalam, Wawancara mendalam dilakukan kepada narasumber untuk memperoleh informasi mengenai topik penelitian yang dilakukan penulis. Narasumber dalam penelitian ini adalah jurnalis SKH Riau Pos yang meliput dan menulis berita terkait kebakaran hutan yang terjadi di Riau yang dijadikan tempat untuk melakukan penelitian.

Pertanyaan yang dilampirkan dapat dikembangkan sesuai dengan proses wawancara dengan narasumber. Pertanyaan yang diberikan kepada narasumber sesuai dengan teori yang digunakan yaitu, Jurnalisme Lingkungan dan Kinerja Jurnalistik. Berikut ini beberapa pertanyaan inti yang akan dilakukan untuk wawancara dengan narasumber :

Data Narasumber :

Nama :

Usia :

Asal :

Media :

Jabatan dalam media :

Lama bekerja :

Pendidikan Terakhir :

Pertanyaan berdasarkan teori yang digunakan diajukan untuk menjawab penelitian ini :

1. Bagaimana *problem* atau kendala kerja yang anda hadapi ketika menjalankan tugas jurnalistik, khususnya terkait kebakaran hutan dan lahan di Riau dilihat berdasarkan kewajiban yang harus dilakukan wartawan lingkungan ?
2. Bagaimana mengatasi kesulitan-kesulitan yang datang pada saat melaksanakan tugas sebagai seorang jurnalis lingkungan ?
3. Bagaimana solusi yang anda tawarkan terkait kasus-kasus lingkungan yang terjadi, berhubungan dengan kewajiban sebagai seorang jurnalis lingkungan?
4. Bagaimana peran serta Riau Pos dan Jurnalis Lingkungan terkait kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau yang dituntut untuk bersikap *fair* ?
5. Bagaimana cara Riau Pos menanggapi dan memahami permasalahan lingkungan khususnya kebakaran hutan dan lahan yang sudah sering terjadi di Riau ?
6. Bagaimana *problem* yang dihadapi jurnalis SKH Riau Pos terkait profesi jurnalis lingkungan ?
7. Bagaimana cara yang anda lakukan agar mendapatkan data yang akurat dari narasumber terkait kasus kebakaran hutan dan lahan ?
8. Bagaimana interaksi antara anda dengan redaksi terkait peliputan kebakaran hutan dan lahan ?



## **Transkrip Wawancara Mendalam dengan Jurnalis SKH Riau Pos (Mario)**

**P : Kemarin ngeliput seputar kebakaran hutan juga ?**

**W :** Iya, kami biasanya tim. Kendalanya yang kami alami tu jauhnya medan, kebanyakan kebakaran hutan tu cenderung berada di daerah-daerah yang cukup jauh, misalkan kalau di Riau itu di kabupaten ROHIL, Bengkalis , Rohul, Siak. Jadi paling kendalanya di medan. Tapi kami untuk di Riau Pos sendiri biasanya menurunkan tim. Artinya begini untuk di propinsi kan kita punya Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sama dinas terkait lah. Jadi mungkin kami berbagi tim. Kebetulan kalau saya tugasnya pada waktu itu ikut mengontrol di Badan Penanggulangan Bencana. Kawan-kawan ada yang di BMKG. Secara teknis kendala-kendala kalau untuk peliputan tidak begitu signifikan. Cuma jauhnya medan, sehingga kita lebih cenderung berkomunikasi lewat HP, Soalnya kan kita punya jaringan, di setiap kabupaten kota kita punya kontributor. Jadi untuk mengetahui informasi terbaru itu kita komunikasi (bagaimana kondisi terbaru? Bagaimana titik asap).

**P : Bagaimana mengatasi kesulitan-kesulitan itu ?**

**W :** Caranya kita mungkin kita koordinasi dengan tim-tim yang ada di daerah, di lapangan terus supaya dapat hasil yang lebih valid terkadang kita ikut sama instansi. Terkadang Badan Penanggulangan Bencana mengajak kita, sebagian wartawan juga ada ikut helicopter melihat kondisi asap, titik api. Sebagian juga ada langsung terjun dengan tim-tim yang memadamkan api, kita juga ikut. Kalo saya kemarin pernah ikut sama dinas perkebunan, soalnya di Riau kebanyakan yang terbakar selain hutan yang umum, juga ada perkebunan kelapa sawit, jadi mungkin saat itu kita koordinasi untuk mengatasinya dengan turun ke instansi-instansi terkait.

**P : Solusi apa yang anda tawarkan terkait kebakaran hutan dan lahan ?**

**W :** Mungkin kalau kami dari jurnalis itu permasalahannya, minimnya pengawasan, terus penerapan sanksi kurang tegas. Artinya kedepannya memang harus seluruh *stakeholder*, baik pemerintah, masyarakat, perusahaan, aparat penegak hukum harus mengoptimalkan pengawasan. Jadi api itu, asap lebih cepat ditangani sebelum membesar. Jadi ketika ada pengawasan, ada indikasi kebakaran hutan memang harus langsung. Yang kedua, untuk mengurangi efek jera, memang harus diberikan semacam *punishment* lah yang tegas, soalnya sebagian besar itu juga ada perusahaan terkait kebakaran hutan yang diberikan sanksi, sehingga mereka tidak lagi mengulangi pembakaran hutan untuk membuka lahan .

**P : Bagaimana peran serta riau pos terkait kebakaran hutan dan lahan di Riau ?**

**W :** Kalau Riau Pos ya tetap pada jalurnya. Kita memantau, melaporkan kondisi terkini, menginformasikan kondisi aktual. Terus memang ada juga sih kawan-kawan dari Jikalau Hari, WALHI, WWF itu juga turun, kita juga berkoordinasi sama-sama, mencari informasi, melihat perkembangannya. Yang jelas kalau dari Riau Pos kita memberikan semacam pembelajaran. Soalnya peran media itu juga berperan memberikan pembelajaran pada masyarakat, pada seluruh pihak, bahwa memang asap ini sudah bikin masalah yang rutin. Jadi kasus kebakaran hutan itu penanganannya memang selalu telat. Jadi memang harus perlu kerjasama dengan pihak terkait.

**P : Bagaimana cara Riau pos menanggapi dan memahami permasalahan terkait kebakaran hutan ?**

**W :** Kalau Riau pos kan dari awal sudah mengedepankan prinsip yang jurnalistik, artinya memang selalu setiap pihak itu dikonfirmasi, ditanyakan

kondisinya, penyebabnya. Kebakaran hutan ini kan sering terjadi, apakah ini akan terjadi lagi tahun depan. Gimana kedepannya lahan yang sudah terbakar. Itu yang kadang kita kaitin juga. Kita juga punya halaman minggu, namanya Liputan Khusus. Liputan khusus itu kita kupas penyebabnya, lokasinya, penanganannya, bagaimana kedepannya, apa yang harus dilakukan pemerintah, seluruhlah pihak terkait kita kupas itu, supaya masyarakat tau bahwa kita memang tidak mau men-*judge* diberita, bahwa ini yang salah. Kita paparkan aja, biarkan masyarakat menilai karena kita juga gak ingin satu pihak di *judge* .

**P : Kalau Riau Pos sendiri *concern* dengan kasus-kasus lingkungan gak ?**

**W :** Iya, kita di Riau Pos itu ada halaman namanya “*save the earth*” di hari Minggu, kita kupas itu, cuma memang itu masalah-masalah lingkungan seperti lahan gambut, efek rumah kaca dan segala macam terkait lingkungan. Masalah asap juga berkali-kali dikupas di halaman itu. Itu salah satu bukti kalau memang kami dari Riau Pos *concern* untuk bidang lingkungan hidup. Ada timnya juga yang mengupas masalah lingkungan.

**P : Bagaimana *problem* yang dihadapi jurnalis SKH Riau Pos terkait profesi jurnalis lingkungan ?**

**W :** Kalau *problem* secara prinsip gak begitu signifikan, soalnya mungkin kayak intervensi dari perusahaan bisa dikatakan tidak ada, karena memang kami seluruh pihak sering mendapat laporan dari LSM, Kebakaran hutan misalnya, lalu kami konfirmasi itu, ke *stakeholder*, masyarakat, jadi memang semua kami konfirmasi, sehingga berita yang kami beritakan itu memang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan pertimbangan itu mungkin pihak perusahaan atau masyarakat gak bisa mengintervensi. Kami di lapangan sangat luas dalam melaksanakan tugas, artinya memang tidak ada beban. Untuk masalah asap ini, sampai ribut-ributnya, sampai presiden sempat *coment* memang jadi topik

utama di halaman depan selalu kami bahas. Ketika itu jadi *headline* dan di halaman depan, itu memang selalu dirapatkan (ohh ini lho yang harus dibahas, ini yg harus dikupas, gitu), jadi memang kami selalu membahas itu disesuaikan dengan isinya. Hampir dua bulan kalau gak salah asap itu dibahas terus.

**P : Kalau untuk konfirmasinya sendiri ada kendala *gak* ?**

**W :** Konfirmasi kebetulan kami di lapangan kan punya tim, kalau saya kebetulan kedatangan konfirmasi itu ke pihak pemerintah, artinya saya konfirmasi ke kepala daerah, sekretaris daerah, badan penanggulangan bencana, dinas kehutanan, badan lingkungan hidup. Teman-teman juga ada sebagian ke Gubernur, Bupati, Walikota, ke pihak terkait, pihak perusahaan. Jadi kalo untuk kendala konfirmasi kalo saya pribadi tidak begitu sulit, intinya kita, informasi ini kan kita peroleh dan kita komunikasikan dengan pihak-pihak terkait, sehingga mereka mau menyampaikan.

**P : Bagaimana cara yang anda lakukan agar mendapatkan data yang akurat dari narasumber terkait kasus kebakaran hutan?**

**W :** Ya memang kalau berbicara data kita harus valid, kalau melihat jumlah titik api, tu biasanya kami di posko. Di badan penanggulangan bencana itu ada posko. Tiap hari kita cari informasi, kalo *gak* kami dikasih *printout* data titik api di kabupaten kota, jumlah pesawat yang diturunkan, jumlah *bom water* yang sudah dilakukan. Sebagian kawan-kawan juga ada yang turun ke lapangan melihat kondisi asap, titik api dan itu nanti dirangkum menjadi satu berita *headline* atau *second headline*.

**P : Bagaimana interaksi antara anda dengan redaksi terkait peliputan kebakaran hutan?**

W : Ini sangat kuat, karena di Riau Pos untuk berita-berita *headline* memang selalu dibahas, pembahasannya itu mulai dari tingkat reporter, korlip dibahas, dirancang segala macamnya. Nanti usulan kami itu dibahas lagi di rapat redaksi, ada redaktur, redpel sampai ke pimrednya langsung. Itu dibahas apa topik yang menarik pada saat itu dan yang akan datang.

P : **Anda kan meliput kebakaran hutan juga, liputan itu atas perintah dari pimred atau inisiatif sendiri ?**

W : Kalau kami liputan kan di BB ada group, kami juga punya rapat harian antara jam lima sampai jam tujuh malam, kecuali hari libur dan hari minggu. Jadi saat rapat itu kita bahas sesuai dengan posko masing-masing, korlip biasanya menanyakan itu, bagaimana perkembangan nya? apa kedepannya?. Usulan dari kami ini dibahas dirapat redaksi, itu liputan yang terencana. Tapi terkadang di lapangan ada suatu hal yang gak kita duga, misalnya, kita akan memprediksi akan mengambil data mengenai kebakaran hutan. Pada saat di lapangan ternyata kepala instansi atau pihak terkait mau turun, *naahh* itu kita langsung ikut kesana dan memantau. Dan setiap perkembangan yang kita peroleh di lapangan kita laporkan kemudian kita tindak lanjuti, kita tanya lagi ke pihak yang terkait. lebih ke *jobdeskription* yang diatur sedemikian rupa, sehingga memang data yang kita peroleh itu maksimal.

P : **Kalau dari jurnalisnya sendiri terkait kebakaran hutan, ikut berperan gak ?**

W : Kami mungkin harus tetap mengedepankan kode etik jurnalistik, artinya memang kami gak bisa ikut langsung, misalnya berkecimpung menyelidiki penyebabnya secara *detail* mungkin *enggak*. Tapi yang jelas kami sesuai dengan peran kami lah. Melihat informasi itu, mengapa bisa terjadi, siapa saja yang disana. Itu yang kami informasikan. Kalau untuk spesifik seperti kayak Jikalau Hari, WALHI, WWF mungkin kami *enggak lah*. Kami hanya sesuai

dengan peran kami, informasi kami kembangkan, memberi informasi kepada publik bahwa inilah kondisi *realnya*.

**P : Kalau ini kan termasuk jurnalisme lingkungan, kalau dari istilah-istilah lingkungan sendiri dan dilihat dari sisi penulisan beritanya ada istilah lingkungan yang masih awam, pembaca belum tau, kalau menurut anda bagaimana cara penulisan yang tepat agar pembaca tau ?**

**W : Biasanya kalau di Riau Pos kalau ada bahasa inggris atau bahasa-bahasa awam, itu kita *bold*, digaris miring atau kami biasanya kasih keterangan dalam kurung, misalnya *booming water* (penyiraman air) hujan buatan, koma red. Intinya tidak mengurangi substansi berita yang kami informasikan.**

**P : Kemarin saya dapat informasi juga dari pak ilham kalo di Riau Pos *gak* ada wartawan yang khusus lingkungan, *nah* itu anda sendiri kan juga meliput tentang lingkungan mengerti *gak sih* tentang istilah-istilah lingkungan, atau pernah ikut seminar *gitu* ?**

**W : Kebetulan saya kan kuliah saya kan di Manajemen Sumber Daya Perairan, Magister saya di Ilmu Lingkungan UNRI, jadi sedikit banyaknya saya juga punya *basic* lah. Karena saya menggeluti ini, Cuma saya sering diskusikan juga sama orang kantor, sama teman-teman saya yang mengerti lah tentang spesifikasinya lingkungan. Yang jelas yang kita informasikan itu memang untuk masyarakat awam. Jadi untuk bahasa-bahasa yang terlalu teknis kita minimalisir itu, ketika memang sudah tidak bisa lagi di elakan dan harus disampaikan ya disampaikan dengan kaidah-kaidah yang ada. Ketika itu bisa kita olah menjadi bahasa-bahasa yang mudah dikenal masyarakat ya kita atur aja gitu.**

**P : Ada *gak sih* misi-misi atau tujuan tersendiri dari jurnalis lingkungan untuk memberitakan kebakaran hutan ?**

W : Yang pasti, baik pribadi maupun instansi, kami dari Riau Pos, semangat kami memang selalu ingin di depan dari media-media yang lain, artinya memang kami selalu coba memberikan informasi pada masyarakat bahwa yang ini jangan sampai terulang lagi, artinya memang kita coba berfikir mengajak, bahkan kita selalu menyampaikan kepada instansi terkait itu kok ini terjadi lagi, selama ini kita dimana. jadi terkadang kami lebih ke pembelajaran kepada publik. Peran kami disana itu mengajak, lebih pada ke persuasif penanganannya, bagaimana kita meminimalisir ini jangan sampai terjadi lagi .

P : **Kalau dilihat dari fungsi media untuk informasi, edukasi dan mediator. Kalo dari wartawan sendiri bagaimana menjalankan tiga fungsi itu terkait kasus kebakaran hutan dan lahan?**

W : Kalau saya dan di tim juga melakukan hal yang sama. Terkait informasi kita lakukan, edukasi mungkin seperti itu yang kita berikan pembelajaran pada masyarakat, kalo mediasi, kita memang terkadang juga berperan mengajak bahwa pihak-pihak terkait itu terkadang ya terlepas dari peran kita sebagai jurnalis juga memberi masukan, kedekatan emosional kita sebagai narasumber, memberikan peluang kepada kita untuk memberikan masukan kepada mereka misalkan (pak kayaknya kita harus melibatkan ini lho ).

P : **Ada gak pedoman kerja jurnalis dalam meliput berita lingkungan?**

W : Spesifik mungkin enggak, tapi kita lebih kepada aturan main di Riau Pos dan ini tidak berlaku di spesifik lingkungan, karena liputan yang masalah hukum, pendidikan paling ketika itu menjadi isu yang menarik kita bahas pertama, kita cari masukan dari berbagai pihak untuk dijadikan pertimbangan sehingga liputan itu lebih terarah .

**P : Kalau berdasarkan datanya bagaimana wartawan menjaga akurasi keseimbangan objektivitas berita ?**

**W :** Kami biasanya lebih ke *record* dan sebagian teman-teman menulis data, dan terkadang meminta data secara langsung, jadi data yang didapat akurat, valid dan dapat dipertanggungjawabkan, untuk mengantisipasi itu paling sering kita *record* .

**P : Kalau dilihat *gak* ada keberpihakan wartawan atau Riau Pos sendiri ke perusahaan atau ke masyarakat ?**

**W :** Itu yang kami kedepankan. Kami memposisikan kami berada ditengah-tengah semuanya, baik perusahaan, masyarakat, pemerintah, penegak hukum dan aparat. Jadi memang kami tidak mau men-*jugde* si A si B salah atau benar. Kami memaparkan kondisinya *real*-nya di lapangan, jadi masyarakat bisa menilai. Kami hanya memaparkan sesuai dengan fakta, sesuai dengan kondisi di lapangan dan sesuai dengan data yang kami peroleh. Terlepas dari masalah masyarakat menilai Si A si B salah itu bukan urusan kita, yang jelas kita melaksanakan tugas memberi informasi secara valid.

**P : Itu kasusnya udah selesai ?**

**W :** Alhamdulillah tim kasutla yang sudah pulang awal November udah selesai , hampir tiga bulan dia disini

**P : Itu beritanya terakhir bulan apa ?**

**W :** Kalau tidak salah awal November, pasca itu kita juga sering *running* tapi tidak se-*intens* biasanya, misalnya langkah antisipasi, langkah himbauan dari BMKG, pengawasan titik api .



**Transkrip Wawancara Mendalam dengan Jurnalis SKH Riau Pos (Muhammad Ali Nurman)**

**P : Kapan kasus kebakaran hutan dan lahan tersebut terjadi ? mohon diceritakan bagaimana kasusnya**

**W :** Ada 3 orang yg diwawancarai ni, sekitar bulan Mei-Juni kebakaran hutan. Itu kami ada 3 orang yg *intens* meliput itu. Eka di poskonya, Mario di Pemprof (apa kebijakan Pemprof terkait itu), aku di masalah hukumnya, karena kebetulan aku ngeliputnya di hukum kriminal, di Polda, Kejari, Kejati. Jadi ketika terkait ini otomatis awalnya kan tentu yang dicari siapa yang bertanggung jawab terhadap ini ? Kita tanya sama polisinya, bagaimana pengembangannya, apalagi saat itu kan Kementrian Lingkungan Hidup melangsir ada 14 perusahaan yang harus bertanggung jawab. Itu kita tanya sama Polda. Polisi waktu itu belum menetapkan kalau perusahaan itu bersalah, polisi malah bertanya 14 itu siapa yang bilang ? Kementrian lingkungan hidup. Oiya kita akan dalaminya itu, kata mereka awalnya. Setiap hari kita pantau terus.karena kita kan sistemnya posko. Artinya selain berita itu kita jug harus produksi berita lain yg terkait posko kita. Tapi itu rutin ditanyanya, akhirnya Polda Riau menetapkan satu perusahaan sebagai tersangka, PT Adei Plantation, tapi hanya perusahaanya saja, orangnya belum. Tapi saat itu kita tanya, kenapa bisa gitu? Artinya, perusahaan itu ada *personnya* yang menyerahkan kebijakannya, perusahaan ini kan lembaga. Lembaga tujuannya tidak ada yang tahu. Hanya sekitar jarak berapa bulanlah dari penetapan itu, akhirnya polda Riau mengirimkan penyidik dari Direktorat Criminal Khusus dari Jogja. Saksi ahli lah, dari saksi ahli ditetapkan dua orang tersangka yaitu GM (*General manager*). Sejauh ini dari dua orang itu satu baru yang ditahap

dua. Artinya berkasnya lengkap, tinggal menunggu penuntutan di pengadilan di Pelalawan.

P : **Itu perusahaannya Indonesia atau perusahaan asing ?**

W : Perusahaan asing, punya Malaysia kalau *gak* salah.

P : **Kalau ngeliput kan butuh data yang benar-bener akurat dan valid, sebagai wartawan sendiri gimana *sih* biar cari data biar benar-bener valid, karena kan itu bakal di *publish* di koran dan dibaca orang banyak, gimana?**

W : Kita sistemnya dari informasi yang di dalam, ada dua informasi yang kita dalam, apa kepastian tentang kasus. Ya itu tentang perusahaan, ada perusahaan yang kabarnya jadi tersangka, kita kejar. Kalau kami biasanya ke Humas Polda kordinasinya, bagaimana konfirmasinya. Tanyakan nama perusahaan nya. Berjalan, kabarnya dua orang ditetapkan tersangkanya. Kalau polisi kebiasaannya kan sebelum berkas ini masuk ke pengadilan mereka tidak pernah membuka ungkap-ungkap. Siapa nama panjang orang itu (latar belakangnya *gak* dibuka), paling hanya inisialnya siapa, warga Negara apa, umurnya berapa.

Karena mereka ini warga negara asing setelah dia tertangkap tentu ada yang mengikuti, yaitu dia di cekal, *nah* untuk mendapatkan data tentang dia, kita konfirmasi ke imigrasi, dari imigrasi lah ketauan nama lengkapnya.

P : **Ada kesulitan *gak* mas buat dapat narasumber?**

W : Kalau sejauh data biasanya kalau belum puas dengan satu narasumber, kita cari narasumber yang lain sebagai perbandingan.

P : **Narasumbernya sendiri susah atau tidak untuk diwawancarai?**

W : Sejauh ini *gak* susah, karena sistemnya sebenarnya posko, kecuali mungkin kalau wartawan nasional yang disini, dia kan sendiri, dia yang megang semuanya, berarti dia kesini, kemana-mana segala macam. Kalau kami, kayak PT ADEI PLANTATION yang ditetapkan sebagai tersangka ini kan daerah operasinya di Pelalawan otomatis kami yang di pekanbaru tidak memikirkan kondisi di Pelalawan bagaimna. Itu orang pelalawan lah yang tau.

P : **Kalau misalkan ni. kita butuh data tentang ini, tapi narasumbernya itu *gak* mau di wawancarai, susah ditemui, padahal kita benar-benar butuh, itu bagaimana ?**

W : Pertama, upaya konfirmasi kan harus ada, biasanya kita punya nomor kontaknya, kalau orangnya ditelepon, disms *gak* jawab, cari tau siapa yang megang kasusnya, karena semua bekerja berdasarkan fungsi tugasnya masing-masing, kalau masalah kebakaran hutan kan Direktorat Criminal Khusus di Polda Riau, pergi kesana gitu. Kalau *gak* dapat juga kita harus menjadikan kawan anggota-anggotanya, secara global *sih*, informasi bisa dari mereka juga. Kita tanya sama anggotanya (ini gmna?), hal ini harus dikonfirmasi (kabarnya ini *kayak* gini ya), kalau kita sudah punya data, kita tanyanya enak, masalahnya kalau kita *gak* punya data, kalau kita tanya ya bakalan gitu, ada pertentangan kerja lah. Kalau wartawan mau buka seluas luasnya kan, kalau polisi membuka seperlunya saja.

P : **Berarti intinya ada *kroscek* lagi dengan narasumber lain?**

W : Ya intinya seperti itu, fungsinya dasar aja *sih* sebenarnya memang.

P : **Jadi untuk mengatasi kesulitan itu, tanya kontaknya, langsung hubungi,. kalau dari anda sendiri, solusi yang ditawarkan apa terkait kasus kebakaran hutan dan lahan ?**

W : Harusnya dievaluasi perusahaan-perusahaan yang ada disini, artinya kalau sudah misalnya kayak perusahaan dijadikan tersangka, otomatis kan ada keputusan bersama, artinya perusahaan yang dianggap salah ini bukan orangnya saja, kan ada dua proses ni :

Perusahaan ditetapkan jadi tersangka, artinya secara *general* ini perusahaan salah, setelah itu baru ditetapkan dua pimpinan jadi tersangka kan, artinya keberadaan perusahaan ini kan dievaluasi.

P : **Itu sebenarnya kebakaran hutan itu karena sengaja dibakar atau karena kebakar karena panas?**

W : Jadi kasus kebakaran di Riau kemaren ini, perusahaan nya cuma satu dan itu satu-satunya sampai sekarang jadi tersangka. Ada tersangka-tersebut perorangan, kalo di cari ada tu. Kalo data aku *gak* hafal, tapi ada. Rata-rata mereka membuka lahan, membuka lahan kalau dengan tata cara umum sekian ratus hektar kan biaya akan mahal. Maka pakai jalan cepat lah mereka, *bakar* aja pakai minyak, disiram.

P : **Kalo dari Riau Posnya sendiri ikut berperan *gak* terkait kasus ini, misalkan menawarkan solusi apa gitu?**

W : Sebenarnya fungsi media itu harus bisa menawarkan solusi, tapi kan tidak secara langsung medianya yang *ngomong*, kita cari siapa orang yang berkompeten untuk itu. Kan bisa minta buah pikiran dari ahli, misalnya pakar lingkungan, lalu kita suguhkan ke masyarakat, siapapun lah nanti masyarakat yang membaca itu. Karena kan diantara pihak-pihak yang berwenang terhadap masalah kebakaran hutan ni kan tidak langsung berkomunikasi, dinas kehutanan misalnya, kan tidak langsung berkomunikasi dengan kapolda. (ada mungkin yg mau disampaikan dinas kehutanan tentang solusi ini tp tidak bisa langsung ke kapolda, lalu melalui siapa? Ya sudah melalui media saja, gitu.).

**P : Kalau Riau Pos sendiri menanggapi permasalahan lingkungan kebakaran hutan dan lahan ini gimana ?**

**W :** Ini penting, malah sampai beberapa terbitan jadi halaman satu terus. Sampai akhirnya ada wartawan Riau Pos yang angkat tentang kebakaran hutan ini, juara tiga di lomba penulisan di KLH itu, redaktur dia. Itu penting karena untuk masyarakat dan isunya sudah nasional dan bencana nasional. Makanya harus ada yang disangkakan . kalau Cuma orang per orang tidak akan separah itu asapnya. Maka dicarilah siapa yang bertanggung jawab terhadap itu.

**P : Itu yang dibakar daerah mana aja ?**

**W :** *Searching* dulu. Itu isu besar, *gak* akan orang per orang yang menggarap , intinya kerja tim.

**P : Kalau dari sisi penulisan beritanya sendiri, ini kan jurnalisme lingkungan, kan banyak pembaca yang masih kurang *ngerti* tentang ada bahasa-bahasa yang mungkin masih belum dimengerti orang, itu bagaimana cara mengatasinya agar pembaca *ngerti* ?**

**W :** Wartawan itu harus mengerti dulu apa yang dia tulis, bentuk sederhana dalam masalah itu yang paling dimengerti masyarakat. Harus seperti itu dikemasnya.

**P : Kalau di Riau Pos sendiri, ada *gak* wartawan yang khusus tentang lingkungan? *nah* kalau anda sendiri kan ini tentang kebakaran hutan otomatis kan ada istilah-istilah lingkungan yang mungkin agak kurang dimengerti, pernah dapat *kayak* misalkan pelatihan khusus *gak* tentang jurnalisme lingkungan ?**

**W :** *Gak sih*, Cuma ya kita harus proaktif, cari tau apa yang tidak kita tau, kita cari tau sendiri (*googling*).

P : **Kalau berita tentang kebakaran hutan nya sendiri tu sekarang sudah *gak* muncul, tapi yang penetapan tersangkanya itu yang masih muncul atau tidak ?**

W : Iya, karena tidak ada masa kadaluarsanya, penyidikan itu kan berproses, penuntutan sampai di persidangan.

P : **Sekarang juga msih berlanjut ?**

W : Masih, karena diantara dua orang ini, baru satu yang berkasnya lengkap untuk penuntutan.

P : **Kalau untuk menulis berita-berita lingkungan ada kesulitan *gak* ?**

W : Sulit itu kan tergantung persepsi kita aja sebenarnya, anggap aja tantangan. Gambarannya, kita kan harus bertanggung jawab untuk memberikan informasi pada masyarakat, gimana caranya kita harus *ngerti*. Kalau kita *gak ngerti*, gimana kita bisa buat masyarakat *ngerti*.

P : **Kalau kasus kebakaran hutan dan lahan, anda liputan atas inisiatif sendiri atau perintah dari pimred ? hubungan antara wartawan dengan pimrednya itu gimana ?**

W : Ya *kayak* aku bilang tadi, kita ini kan penugasan berdasarkan prosedur. kebetulan kasus ini kan ada kaitan dengan masalah hukum, artinya kebakaran hutan ini kan masalah artinya ada pidana yang mengikutinya, pidana itu kan bisa dikenakan kepada siapa saja, yang menangani ya penegak hukum kan, polisi, jaksa. Itu aku liputannya langsung aja ke polda. Setiap hari kita kan *nyari* informasi ni. Aku rasa tidak harus diperintah lah. Cuma ada informasi kita kejar. Karena kan informasi itu bisa dari mana saja. Bisa kita dapat dari narasumber, bisa dari kabar angin yang belum dapat dipastikan dari bocoran-

bocoran. Kalau aku *gak* terlalu banyak *sih*, Cuma mantau masalah hukumnya saja.

P : **Saat ini masih liputan tentang kasus itu ?**

W : Iya mantau terus, Cuma terakhir minggu lalu baru ditahap dua kasusnya, berkasnya lengkap untuk penuntutan.

P : **Disini lagi liputan apa ? (POLRES)**

W : Lagi buat berita, kalau ke kantor jauh. Kalau tugas jurnalistiknya *tu* sama aja *sih* sebenarnya , objek peliputannya aja yang berbeda-beda

P : **Kalau anda sendiri ikut *gak* turun ke lapangan, memantau kebakaran hutan ?**

W : *Gak*, karena kita terikat posko, kalau kita pergi siapa yang jaga posko? Sementara ada kewajiban membuat berita lain juga. satu hari paling tidak 5-6 berita minimal dan harus berita yang berbeda.

P : **Ada *deadline* juga ?**

W : Iya, *deadline* sore, setiap hari. Karena Riau pos itu terbitnya ada 44 halaman.

P : **Itu kebakarannya kan udah sering, selama sering terjadi kebakaran itu selalu ngeliput tentang kebakaran *gak*?**

W : Aku jadi wartawan baru tiga tahun, baru satu kali kemaren yang besar-besaran, yang ikut liputan ini ya baru kali ini. kalau yang ke lokasi kebakaran cuma yang kecil-kecil, sekitar kota, polisi kan ada juga bantu turun,naik mobil *water canon* itu, kalau yang posko penanggulangannya langsung kan mereka pakai helikopter. Ya bekerja sesuai fungsi aja. Kalau aku mantau masalah hukum kriminalnya. kalau terus mantau kesana, kan sudah ada Eka, sudah ada *jobdesknya* masing-masing.

**P : Sebelum kerja di Riau pos kerja dimana ?**

**W :** Sebelum itu kuliah, aku sama Eka sama masuk Riau posnya. Kalau wartawan baru sih awalnya *gak* langsung di tempatkan di Polda, *kayak* aku awalnya di polsek-polsek. Wartawan harus punya jaringan yang luas, jadi dia tau. Kita wawancara pun tidak bisa langsung, kita harus tanya kan ulang, apakah orang tersebut yang menangani kasusnya. Kalau dilihatnya kita tidak cakap, dia menghindar-menghindar. Karena kita wawancara cari tau dulu sama teman-teman wartawan. lalu kita telepon aja, (pak mau tanya masalah ini), kalau itu kewenangan dia, pasti akan langsung dijawab, tapi kalau itu bukan kewenangan dia, pasti dia akan jawab, itu tidak kewenangan saya. Kalo instansi itu pasti ada Humas, yang awal tu pasti kita ke Humas, tanya tentang masalah ini, mau jumpa dengan orang yag terkait dengan hal ini.

**P : Kalau misalkan itu kasus kewenangan dia, tapi dia *gak* mau *ngasih* informasi, bagaimana?**

**W :** oo bagus sekali, ada yang ditutupi itu pasti masalah. Masalah ini kita mau tanyakan tentu kita sudah punya latar belakang. Kita coba kontak dia. Ditelepon *gak* jawab, disms *gak* balas, ya udah untuk konfirmasi kita buat itu. Masalahnya berita kita kan hak jawabnya nanti ada. Kita kejar dia bukan karena hak dia pribadi tapi karena itu kewenangan dia, atas dasar tugas dan jabatan dia, makanya dia pun harus menjawab. Rata-rata pejabat sekarang sudah banyak yang *ngerti*, walaupun dia belum siap (nanti dulu ya atau tunggu sebentar aku cari informassi lengkapnya).

Kalau *kayak* kami di Riau pos itu ada jurnalisme akomodatif, kita mengakomodir orang, artinya sesalah apapun orang, dianya harus ditanya apa sebenarnya permasalahannya. Karena permasalahan itu kan tidak muncul dari ruang hampa, berita yang menjual itu kan berita masalah.



**P : Kalau anda sendiri pernah *gak ngalamin* seperti itu, misalnya *nyari* orang tapi *gak* bisa ditemui terus ditulis seperti tadi, tapi narasumbernya itu protes dan menggunakan hak jawabnya?**

**W : Ada yang marah-marah aja, karena diberitakan, *gak* ada hak jawab, ya udah *gak* apa-apa.**

**P : Ada *gak* yang sampai nuntut karena pemberitaannya tidak benar ?**

**W : Sampai somasi belum pernah sejauh ini.**

**P : Kalau Riau Pos sendiri lebih pro kemana *sih* dalam hal pemberitaannya?**

**W : Kita akomodatif, mengakomodir.**

**P : Kalau mau liputan kan ada persiapan-persiapan tersendiri, dari mulai liputan sampai berita dikirim. Itu ada persiapan khusus *gak* saat akan meliput berita kebakaran hutan ini ?**

**W : Setiap pagi kebiasaan wartawan tu baca-baca, apa yang bagus, informasi sekecil apapun dalami-dalami. Persiapannya paling, mulai bekerja dengan pikiran yang jernih.**

**Transkrip Wawancara Mendalam dengan Jurnalis SKH Riau Pos (Eka Gusmadi Putra)**

P : **Kapan kebakaran hutan dan lahan itu terjadi ?**

W : Awal Juni, ya awal Juni karena *dah* kemarau kan

P : **Beritanya muncul mulai bulan Juni sampai kapan mas ? bisa diceritakan awal kasusnya?**

W : Awal Juni, *dah* mulai kemarau awal-awal itu *kan*. Itu mulai banyak lahannya kebakar. Itu pakai puntung aja udah kebakar *kan* karena lahan-lahan di Riau ini lahannya *kan* gambut, jadi itu dimanfaatkan sama ini, sama orang yang buka lahan untuk perkebunan. Kebanyakan sawit, terus karet. Jadi ada yang perorangan ada yang perusahaan memang. Cuman mereka memanfaatkan orang gitu untuk membakar.

P : **Itu memang sengaja dibakar gitu ?**

W : Itu ada yang disengaja. Itu tadi yang buka lahan. Makanya sampai sekarang *kan* masih ada beberapa tersangka. Terus dari awal Juni, pertengahan Juni itu mulai terasa kabutnya. Aku karena baru buat kaledoskopnya jadi masih sedikit ingat. Waktu 21 Juni pokoknya ributlah . Tanggal-tanggal belasan, 17, 18 dah mulai anak-anak sekolah *diliburin*, terus data Dinas Kesehatan juga sudah banyak masyarakat yang terserang ISPA, itu sudah merata diseluruh kabupaten kota di Riau.

Tanggal 20 *kan* pemberitaan di Singapore mulai menentang SBY tu *kan*, *dah* mulai sampai Malaysia, Singapore, Filipina dan sebagian Thailand *kan*. Terus dari 21 disini rapat. Semua *tu*, Wakil Gubernur, Danrem, Danlanud, Kapolda. Jadi ditetapkan waktu itu tanggap darurat asap *kan* statusnya itu. Sorenya

habis rapat itu, tiga menteri kesini langsung *tu*, Gamawan, Agung Laksono sama Menteri pertanian Kuswono, sama kepala BNPB. Dari situ mulai dibuka posko disana, di Lanud TNI AU Roesmin Nurjadin namanya. Disitu ada posko, *nah* disitu ada penanganan bom air, terus teknologi modifikasi cuaca sampai 20 hari.

P : **Itu kebakarannya di daerah mana aja mas ?**

W : Hampir seluruh Kabupaten *tu*, Bengkalis, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Pelalawan, Pekanbaru, Siak, lebih ke arah sini sih, ke pesisir. Cuman setelahnya menyebar juga Inhu (Indra Giri Hulu), Inhil (Indra Giri Hilir), Kampar, Kuansing.

P : **Masnya juga ikut terjun langsung ke lapangan ?**

W : Sempat ikut yang nyemai garam itu *kan*, yang ikut bikin hujan buatan, terus sempat turun ke Pelalawan juga, ya beberapa kali lah. Tapi yang jelas *stanbay* di posko penanggulangan bencana itu di TNI AU, karena beritanya harus rutin *kan*, harus di *follow up* terus, dari hasil penanganannya *gimana sih*, dari yang titik api awalnya tanggal 20 sampe 90an *kan*, semakin nurun, terus tanggal 5 udah mulai nol titik apinya, 5 Juli.

Tapi beres Juli ,masuk Agustus, pertengahan Agustus ada lagi, kebakar lagi. Itu lebih banyak di Pelalawan, Inhu sama Bengkalis, Siak. Itu sempat ada penanganan. Iya ini yang paling parah *kan* dari 2007. Sampai ke Malaysia juga *kan*. Ya kayak ada siklus *gitu*, siklus lima tahunan hehehehe. Ya mungkin *entah* iya *entah* tidak terlepas dari unsur politiknya, jadi bergening politik itu *kan* untuk buka lahan. *Emang* kebakaran juga, cuman *emang* yang paling parah. Jadi *kayak* Pelalawan yang dekat aja *kan* , mulai dari gerbang masuk itu sudah kebakar semua, Rohil juga. Kebetulan juga waktu itu kata BMKG asap itu mengarah ke Singapore, sampai ke Malaysia.

**P : Bagaimana permasalahan yang dihadapi ketika menjalankan tugas jurnalistik, khususnya terkait kebakaran hutan di Riau?**

W : Dari awal *emang* sudah kendala *sih*, kenapa? Karena poskonya di AU. *Kan* tau wartawan sama TNI AU *kan* pernah dulu waktu Sukhoi jatuh, pesawat tempur itu jatuh. Sejak itu hubungan sudah tidak baik. Masuk saja kami harus diperiksa dengan tepat, KTP ditinggal, *ngisi* absen. Itu kendala awal. Tapi karena dari BNPBnya ini menjadi isu nasional, BNPB yang *back-up* untuk berangkat mau nyemai. Cuman waktu itu *ngebom ndak* bisa, karena terbatas *kan*, karena helikopternya sendiri bawa beban air 2000an liter, kalau kendala peliputan herkulesnya sendiri *kan*, herkules ketinggiannya *kayak gitu*. Kita *gak* pernah *kan*, karena diatas *kan* nyari awan yang benar-benar awan bisa dijadiin hujan. Jadi naik *ni* 1500 misalnya *kan*, *gak* ketemu awannya, naik lagi sampai ketempat yang kekurangan udara gitu. Itu kalau di udaranya.

Kalau di lapangannya pasti medannya, karena cenderung pemadaman itu tidak yang dipinggir jalan *kan* itu, harus masuk kedalam, karena hawanya sendiri udah panas.

**P : Masnya sendiri pernah masuk *gak* ?**

W : Iya, kami pernah investigasi sama fotografer

**P : Itu *kan* sulit banget, bagaimana cara mengatasi kesulitan-kesulitan yang datang pada saat melaksanakan tugas sebagai seorang jurnalis lingkungan ?**

W : Sebenarnya kebakaran hutan dan lahan tugas sebagai peliput juga gitu, yang juga ditugasi kantor, ya *kayak* ke lapangannya gitu ya bisa diatasi aja *sih*. Paling memang tidak sebentar, butuh waktu. Misalnya *gak* bisa selesai hari ini, konfirmasi lagi ke kantor belum dapat bahannya terus *nginap* dulu gitu. Minta waktu aja *sih*.

P : **Karena ada *deadline-deadline* gitu ya ?**

W : Iya, paling bahan seadanya sampai disitu aja, paling konfirmasi terbatas aja sama kepala BPPD sini *by phone* gitu.

P : **Ini *kan* termasuk jurnalisme lingkungan *kan* ya. Kalau dari dari jurnalisme lingkungannya sendiri ada *problemnya* *gak*? *Kan* *gak* secara umum, misalnya kayak politik sendiri, *kan* beda-beda kesulitannya. Kalau di lingkungan sendiri ada kesulitan tersendiri *gak* saat *ngeliput*?**

W : Dari lingkungan, kesulitannya kita *ngadepin* asap, rentan dengan Ispa. Pada waktu itu indeks Ispu itu sudah jauh di atas dari yang awalnya 230 standartnya, ini sudah sampai 350-400. Dan bukan untuk pribadi juga, tapi untuk Riau keseluruhan, untuk flora dan faunanya juga. Masyarakatnya juga memang sudah tercemar. Kementerian Lingkungan Hidup juga langsung turun waktu itu *kan* .

P : **Kalau dari sisi penulisannya sendiri, itu *kan* ada istilah-istilah khusus juga *kan* kalau di lingkungan, seperti Ispa, Ispu. Itu *gimana* ?*kan* ada tu pembaca yang kurang *ngerti* tentang istilah-istilah gitu, *nah*, masnya sendiri *gimana* nulisnya biar pembaca itu *ngerti* maksudnya ?**

W : Ya kalau misalnya bahasa awam *gak* apa-apa *kan* dituliskan langsung. Cuma kalau ada istilah dari lingkungan hidup atau dari tulisan mengenai itu, paling dikasih penjelasan aja setelahnya. Misalnya Ispu itu tadi, ya dijelasin aja beberapa kata gitu, Ispu itu apa *sih* gitu, kenapa lahan gambut itu mudah terbakar, dan segala macam. Paling kalau aku *gak* tau istilah itu artinya apa dan narasumber tidak bisa jelasin pada saat itu juga, paling ya *searching*, karena memang banyak bahasa baru.

P : **Untuk jurnalisme lingkungan sendiri ada pelatihan khususnya *gak* mas, *kan* itu tadi ada bahasa-bahasa awamnya?**

W : Untuk pelatihan khusus seperti itu tidak ada. Cuma kalau seminar atau worksop gitu mengenai lingkungan yang diadakan oleh BKSDA sering ikut.

P : **Jadi sedikit *ngerti* lah ya tentang istilah-istilah gitu ?**

W : Sedikit memahami. Ya itu tadi kalau benar-benar belum ngerti dan belum paham ya *googling*.

P : **Bagaimana solusi yang ditawarkan terkait kasus-kasus lingkungan yang terjadi, khususnya kebakaran hutan dan lahan yang belum lama ini terjadi di Riau?**

W : Emang harus ada regulasi yang jelas sebenarnya untuk masyarakat atau perusahaan yang membuka lahan gimana *sih* gitu. Misalnya mereka punya areal 1000 hektar gitu, yang untuk penanamannya 500 hektar. Cara untuk membuka lahan itu harus jelas gitu. Harus ada regulasi dari Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian, Kementerian Perkebunan, semuanya harus bersinergi gitu. Jadi dengan gitu kan, kata Siswono juga kan waktu itu ada cara lain untuk membuka lahan selain membakar, tidak dengan membakar gitu. Bisa dengan menggunakan alat berat dan segala macam. Cuman kan kendalanya bagi perusahaan atau masyarakat yang pengen berkebun itu, biayanya jauh lebih mahal. Kalau pakai api kan tinggal siram aja pakai bensin habis. Tapi kalau ada regulasi kan bisa jelas, Polda juga bisa nindak tegas. Karena rata-rata dari belasan tersangka dalam kebakaran kemarin itu perusahaan Malaysia, makanya kalau Riau sendiri menangani ini gak mungkin bisa. Ini butuh sinergi dari semua kementerian.

P : **Sekarang masih berlanjut *gak* kasusnya itu ?**

W : Masih, sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka

P : **Kalau kebakarannya sendiri masih ada atau tidak ?**

W : Untuk kebakarannya sendiri sudah tidak ada, kan musim hujan. Tapi untuk Riau sendiri sudah ada kemajuan sih. Karena kemarin sudah disahkan juga perda tentang bencana alam. Dari perda itu nanti Riau sendiri sebelum musim kemarau, sebelum kebakaran itu sendiri terjadi bisa dilakukan penanganan. Lewat sosialisasi atau penjelasan kepada perusahaan untuk tidak membuka lahan dengan membakar. Baru disahkan kemarin 25 November.

P : **Itu beritanya terakhir bulan apa mas ?**

W : Ya yang 10 Juli posko ditutup , terus udah mulai pelacakan tersangka, titik api sudah *gak* ada. Di pertengahan Agustus kebakaran lagi, tapi bukan yang di lokasi pertama. Pindah lokasi kebakarannya.

P : **Pertengahan Agustus sampai kapan ?**

W : Sampai 31 Agustus, karena kan BNPB masih pakai helicopter. *Dah* masuk September udah *gak* ada lagi, curah hujan udah mulai turun lagi

P : **Bagaimana peran serta Riau Pos dan Jurnalis Lingkungan terkait kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau ?**

W : Ya perannya paling sebagai media kontrol sosial , memberitakan saja dan memang kami selalu menempatkan itu di halaman satu, di *headline*. Terus kan Riau Pos dibaca oleh masyarakat, pejabat, segala macam. Dari situ aja sih berharap *follow up*nya terus. Kan karena grup Jawa Pos, jadi yang besar-besarnya tetap dinaikkan di JPNN, selain di *online* dan di Koran. Kan isunya menyangkut SBY, pasca dia minta maaf sama Singapore.

P : **Riau Pos sendiri *concern* gak sama masalah-masalah lingkungan ?**

W : Ya *concern*. Tiap minggu kan kita siapkan halaman *save the earth*. Tiap minggu kan ada itu.

**P : Setiap minggu pasti ada ?**

W : Ada, pasti ada. Semua tentang lingkungan. Ada tim minggunya.

**P : Anda sendiri ikut nulis di halaman *save the earth* gak ?**

W : *Nggak*. Senin sampai Kamis *tu* dia keliling, Jumat, Sabtu baru *deadline*.

**P : Bagaimana cara Riau Pos menanggapi dan memahami permasalahan lingkungan khususnya kebakaran hutan dan lahan yang sudah sering terjadi di Riau ?**

W : Lewat pemberitaan aja *sih* sebenarnya. Tapi tim minggu juga setiap mereka bergerak ke lapangan itu selalu mengajaklah. Mengajak perusahaan agar tetap perduli. Karena kan kalau tidak ada peran media juga akan jauh lebih parah *sih*.

Karena gampang benar disini dirusak. Kalau ada kemarau ya udah, tinggal lempar puntung rokok aja bisa kebakar ribuan hektar kalau *dibiarin*. Satu lagi keterbatasan Riau juga kemarin, *gak* ada peralatan yang cukup, jadi harus minta bantuan.

**P : Kalau di Riau Pos ada *gak* jurnalis yang khusus lingkungan ?**

W : Paling ya tim minggu, karena yang harian tiap tahun pindah-pindah. Harus *nguasain* semua. Gak ada wartawan khusus. Paling yang ada ya wartawan budaya. Kalau lingkungan ya lihat situasinya aja. Kalau memang *scopenya* propinsi ya aku.

**P : Bagaimana cara yang dilakukan agar mendapatkan data yang akurat dari narasumber terkait kasus kebakaran hutan dan lahan ?**

W : Ya gerak ke ini aja, ke BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), terus ke BLH (Badan Lingkungan Hidup), yang punya data itu *sih* dua itu,



sama dinas perkebunan dan kehutanan. Kalau misalnya pengen data tentang ISPU minta ke lingkungan hidup. Pengen minta tentang data yang terserang ISPA misalnya minta ke kesehatan, gerak-gerak gitu aja.

**P : Itu mereka *ngasih* atau ada kesulitan-kesulitannya untuk *dapetin* data itu ?**

**W :** Ada, kadang banyak alasan untuk yang berkompeten memberi informasi itu tidak ada, nanti telepon kepala dinasnya aja.

**P : Wawancara via telepon gitu ?**

**W :** Telephone, minta arahan kepada kepala dinasnya, minta data kemana *ni*, biar dia yang delegasikan. Kalau udah kepalanya yang bilang kan, udah ikut aja orang. Karena kalau minta Gubernurnya kan, waktu itu gubernurnya di KPK, jadi wakilnya. paling kalo *mentok* gak dapat, sementara *deadline*, minta ke wakil gubernur.

**P : Itu pasti dikasih atau tidak ?**

**W :** Dari gubernur dimintakan ke anggota-anggotanya.

**P : Wakil gubernur itu pasti mau untuk diwawancarai ?**

**W :** Kalau untuk yang kasus Karhutla kemarin ya mau. Kalau isu publik biasanya mereka mau *ngasih*.

**P : Jadi *gak* terlalu banyak kendala ya ?**

**W :** *Nggak*, BMKG juga untuk titik api mereka mau *ngasih*

**P : Anda sendiri *kan* ikut *ngeliput* kebakaran hutan dan lahan, itu perintah dari pimred atau inisiatif sendiri untu meliput ?**

W : Untuk turun di lapangan seringnya inisiatif. Karena kan pasokan berita harus tetap terjaga. Inisiatif aja. Misalnya bang aku ikut nyemai ya, beritanya gimana? Aman

P : **Jadi *gak* harus diperintah untuk liputan ?**

W : *Nggak*, yang jelas jaga posko aja, kalau isunya propinsi ya itu kewenangan ku. Selesai liputan langsung kirim berita *by email*, *gak* mesti ke kantor. Kalau lagi liputan gini ada rapat kan *gak* mungkin ke kantor. Apalagi kalau yag di Pelalawan kan *gak* mungkin ikut rapat.

P : **Rapatnya mingguan atau gimana ?**

W : Rapatnya sebenarnya tiap hari. Cuman ya itu tadi kalau kita *gak* bisa ke kantor ya tinggal bilang aja karena liputan *gak* bisa ke kantor, berita kirim aja.

P : **Kalau kebakaran yang sebelumnya ikut *ngeliput* juga ?**

W : Kalau kebakran yang 2012 aku *gak ngurusi*. Ya itu tadi, kita dipindah-pindahin tiap tahun biar menguasai semua, *gak* ada yang khusus, yang tim minggu juga. *Kayak* aku gitu, udah *ngerasain* semua posko, nanti ditarik tim minggu. Itu kan ada liputan khusus juga, ada liputan *for us* juga.

Ya kendalanya itu aja, ya sebagai jurnalis juga sebenarnya *gak* ada yang bisa jadi kendala. Kalau *gak* bisa narasumber yang ini, cari narasumber lain. Kalau *deadline* memang datanya Cuma segini ya kita bilang nanti bisa di *follow up* lagi.

P : **Sebelum liputan ada persiapan-persiapan khusus *gak sih*? Misalnya mau kemana, mau wawancara siapa, cari data kemana. Dari persiapan liputan sampai pengiriman beritanya ada kendala *gak* ?**

W : Kita lihat isu hari sebelumnya sama hasil rapat sore, jadi bisa tau. Kalau misalnya *gak* ada *moment* besar. *Follow up* yang hari ini. misalnya hari ini di halaman satu atau halaman pro otonomi itu masalah pembatasan lima desa, misalnya *gak* ada penjelasan, *follow up* aja ke propinsi.

P : **Kalau kebakaran hutan kemarin dari Juni, Juli, Agustus, itu liputannya setiap hari atau gimana ?**

W : Ya setiap hari. Ya *progress* penanganannya lah ya, terus misalnya hari ini berapa yang di bom, hasilnya, terus besok rencananya kemana, gimana hasil seminggu. Terus dilihat dari aspek lain, lingkungannya gimana, sudah berapa yang terbakar, *follow up*nya gimana. Gitu aja *sih* kalau peran Riau Posnya sendiri.

P : **Jadi hampir setiap hari berita kebakaran muncul di *headline* ya ?**

W : Iya, dari tanggal 20 Juni samapai tanggal 5 Juli lah, sekaligus fotonya.

P : **Fotografernya ikut juga atau anda sendiri ?**

W : Ya fotografernya ada.

P : **Kalau Riau Pos kan media lokal. Biasanya ada kedekatan tersendiri pada masyarakat Pekanbaru, Riau. Gimana *sih* biar masyarakat itu percaya dengan pemberitaan Riau Pos? dari sisi penulisan beritanya sendiri gimana, kan masyarakat butuh banyak informasi perkembangan kasus kebakaran hutan dan lahan?**

W : Ya ini aja *sih*, menyajikan berita yang *real*. Kan pernah turun di lapangan, jadi tau menyajikan berita menurut masyarakatnya aja gimana. Bagaimana *ngerasain* kebakaran hutan. kan sampai ada korban kan, sampai ada yang meninggal. Ya turun ke lapangan terus. Ya menyajikan tulisan yang

menunjukkan empati lah ya dalam penulisannya. Mencoba di posisi masyarakat. Terus diambil *statement* dari pemerintah untuk penanganannya.

P : ***Gak* berpihak ke salah satunya ?**

W : *Gak*. Ya itu juga gunanya turun ke lapangan, tau kondisi *realnya*. Karena *omongan* pejabat, *omongan* tim di posko itu kan yang oke-oke aja kan, gimana *realnya* di lapangan mereka *gak* mau menyebutkan. Selain itu juga karena Riau Pos punya wartawan diseluruh kabupaten, jadi penyajiannya bisa berimbang. 12 Kabupaten kota ada.

P : **Kalau disini sendiri ada berapa wartawannya ?**

W : Pekanbaru yang di lapangan ada belasan. Gak sampai 15 sih. Pemberitaan satu wilayah bukan aku sendiri, tapi keroyokan. Tapi yang konsen di posko aku. *Kayak* yang di Polda ya harus *follow up* yang disana.

## Interview Guide

Dalam penelitian kualitatif ini metode utama yang digunakan adalah wawancara mendalam, Wawancara mendalam dilakukan kepada narasumber untuk memperoleh informasi mengenai topik penelitian yang dilakukan penulis. Narasumber dalam penelitian ini adalah jurnalis SKH Riau Pos yang meliput dan menulis berita terkait kebakaran hutan yang terjadi di Riau yang dijadikan tempat untuk melakukan penelitian.

Pertanyaan yang dilampirkan dapat dikembangkan sesuai dengan proses wawancara dengan narasumber. Pertanyaan yang diberikan kepada narasumber sesuai dengan teori yang digunakan yaitu, Jurnalisme Lingkungan dan Kinerja Jurnalistik. Berikut ini beberapa pertanyaan inti yang akan dilakukan untuk wawancara dengan narasumber :

Data Narasumber :

Nama :

Usia :

Asal :

Media :

Jabatan dalam media :

Lama bekerja :

Pendidikan Terakhir :

Pertanyaan berdasarkan teori yang digunakan diajukan untuk menjawab penelitian ini :

1. Bagaimana *problem* atau kendala kerja yang anda hadapi ketika menjalankan tugas jurnalistik, khususnya terkait kebakaran hutan dan lahan di Riau dilihat berdasarkan kewajiban yang harus dilakukan wartawan lingkungan ?
2. Bagaimana mengatasi kesulitan-kesulitan yang datang pada saat melaksanakan tugas sebagai seorang jurnalis lingkungan ?
3. Bagaimana solusi yang anda tawarkan terkait kasus-kasus lingkungan yang terjadi, berhubungan dengan kewajiban sebagai seorang jurnalis lingkungan?
4. Bagaimana peran serta Riau Pos dan Jurnalis Lingkungan terkait kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau yang dituntut untuk bersikap *fair* ?
5. Bagaimana cara Riau Pos menanggapi dan memahami permasalahan lingkungan khususnya kebakaran hutan dan lahan yang sudah sering terjadi di Riau ?
6. Bagaimana *problem* yang dihadapi jurnalis SKH Riau Pos terkait profesi jurnalis lingkungan ?
7. Bagaimana cara yang anda lakukan agar mendapatkan data yang akurat dari narasumber terkait kasus kebakaran hutan dan lahan ?
8. Bagaimana interaksi antara anda dengan redaksi terkait peliputan kebakaran hutan dan lahan ?

## **Transkrip Wawancara Mendalam dengan Jurnalis SKH Riau Pos (Mario)**

**P : Kemarin ngeliput seputar kebakaran hutan juga ?**

**W :** Iya, kami biasanya tim. Kendalanya yang kami alami tu jauhnya medan, kebanyakan kebakaran hutan tu cenderung berada di daerah-daerah yang cukup jauh, misalkan kalau di Riau itu di kabupaten ROHIL, Bengkalis , Rohul, Siak. Jadi paling kendalanya di medan. Tapi kami untuk di Riau Pos sendiri biasanya menurunkan tim. Artinya begini untuk di propinsi kan kita punya Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sama dinas terkait lah. Jadi mungkin kami berbagi tim. Kebetulan kalau saya tugasnya pada waktu itu ikut mengontrol di Badan Penanggulangan Bencana. Kawan-kawan ada yang di BMKG. Secara teknis kendala-kendala kalau untuk peliputan tidak begitu signifikan. Cuma jauhnya medan, sehingga kita lebih cenderung berkomunikasi lewat HP, Soalnya kan kita punya jaringan, di setiap kabupaten kota kita punya kontributor. Jadi untuk mengetahui informasi terbaru itu kita komunikasi (bagaimana kondisi terbaru? Bagaimana titik asap).

**P : Bagaimana mengatasi kesulitan-kesulitan itu ?**

**W :** Caranya kita mungkin kita koordinasi dengan tim-tim yang ada di daerah, di lapangan terus supaya dapat hasil yang lebih valid terkadang kita ikut sama instansi. Terkadang Badan Penanggulangan Bencana mengajak kita, sebagian wartawan juga ada ikut helicopter melihat kondisi asap, titik api. Sebagian juga ada langsung terjun dengan tim-tim yang memadamkan api, kita juga ikut. Kalo saya kemarin pernah ikut sama dinas perkebunan, soalnya di Riau kebanyakan yang terbakar selain hutan yang umum, juga ada perkebunan kelapa sawit, jadi mungkin saat itu kita koordinasi untuk mengatasinya dengan turun ke instansi-instansi terkait.

**P : Solusi apa yang anda tawarkan terkait kebakaran hutan dan lahan ?**

**W :** Mungkin kalau kami dari jurnalis itu permasalahannya, minimnya pengawasan, terus penerapan sanksi kurang tegas. Artinya kedepannya memang harus seluruh *stakeholder*, baik pemerintah, masyarakat, perusahaan, aparat penegak hukum harus mengoptimalkan pengawasan. Jadi api itu, asap lebih cepat ditangani sebelum membesar. Jadi ketika ada pengawasan, ada indikasi kebakaran hutan memang harus langsung. Yang kedua, untuk mengurangi efek jera, memang harus diberikan semacam *punishment* lah yang tegas, soalnya sebagian besar itu juga ada perusahaan terkait kebakaran hutan yang diberikan sanksi, sehingga mereka tidak lagi mengulangi pembakaran hutan untuk membuka lahan .

**P : Bagaimana peran serta riau pos terkait kebakaran hutan dan lahan di Riau ?**

**W :** Kalau Riau Pos ya tetap pada jalurnya. Kita memantau, melaporkan kondisi terkini, menginformasikan kondisi aktual. Terus memang ada juga sih kawan-kawan dari Jikalau Hari, WALHI, WWF itu juga turun, kita juga berkoordinasi sama-sama, mencari informasi, melihat perkembangannya. Yang jelas kalau dari Riau Pos kita memberikan semacam pembelajaran. Soalnya peran media itu juga berperan memberikan pembelajaran pada masyarakat, pada seluruh pihak, bahwa memang asap ini sudah bikin masalah yang rutin. Jadi kasus kebakaran hutan itu penanganannya memang selalu telat. Jadi memang harus perlu kerjasama dengan pihak terkait.

**P : Bagaimana cara Riau pos menanggapi dan memahami permasalahan terkait kebakaran hutan ?**

**W :** Kalau Riau pos kan dari awal sudah mengedepankan prinsip yang jurnalistik, artinya memang selalu setiap pihak itu dikonfirmasi, ditanyakan



kondisinya, penyebabnya. Kebakaran hutan ini kan sering terjadi, apakah ini akan terjadi lagi tahun depan. Gimana kedepannya lahan yang sudah terbakar. Itu yang kadang kita kaitin juga. Kita juga punya halaman minggu, namanya Liputan Khusus. Liputan khusus itu kita kupas penyebabnya, lokasinya, penanganannya, bagaimana kedepannya, apa yang harus dilakukan pemerintah, seluruhlah pihak terkait kita kupas itu, supaya masyarakat tau bahwa kita memang tidak mau men-*judge* diberita, bahwa ini yang salah. Kita paparkan aja, biarkan masyarakat menilai karena kita juga gak ingin satu pihak di *judge* .

**P : Kalau Riau Pos sendiri *concern* dengan kasus-kasus lingkungan gak ?**

**W :** Iya, kita di Riau Pos itu ada halaman namanya “*save the earth*” di hari Minggu, kita kupas itu, cuma memang itu masalah-masalah lingkungan seperti lahan gambut, efek rumah kaca dan segala macam terkait lingkungan. Masalah asap juga berkali-kali dikupas di halaman itu. Itu salah satu bukti kalau memang kami dari Riau Pos *concern* untuk bidang lingkungan hidup. Ada timnya juga yang mengupas masalah lingkungan.

**P : Bagaimana *problem* yang dihadapi jurnalis SKH Riau Pos terkait profesi jurnalis lingkungan ?**

**W :** Kalau *problem* secara prinsip gak begitu signifikan, soalnya mungkin kayak intervensi dari perusahaan bisa dikatakan tidak ada, karena memang kami seluruh pihak sering mendapat laporan dari LSM, Kebakaran hutan misalnya, lalu kami konfirmasi itu, ke *stakeholder*, masyarakat, jadi memang semua kami konfirmasi, sehingga berita yang kami beritakan itu memang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan pertimbangan itu mungkin pihak perusahaan atau masyarakat gak bisa mengintervensi. Kami di lapangan sangat luas dalam melaksanakan tugas, artinya memang tidak ada beban. Untuk masalah asap ini, sampai ribut-ributnya, sampai presiden sempat *coment* memang jadi topik

utama di halaman depan selalu kami bahas. Ketika itu jadi *headline* dan di halaman depan, itu memang selalu dirapatkan (ohh ini lho yang harus dibahas, ini yg harus dikupas, gitu), jadi memang kami selalu membahas itu disesuaikan dengan isinya. Hampir dua bulan kalau gak salah asap itu dibahas terus.

**P : Kalau untuk konfirmasinya sendiri ada kendala *gak* ?**

**W :** Konfirmasi kebetulan kami di lapangan kan punya tim, kalau saya kebetulan kedatangan konfirmasi itu ke pihak pemerintah, artinya saya konfirmasi ke kepala daerah, sekretaris daerah, badan penanggulangan bencana, dinas kehutanan, badan lingkungan hidup. Teman-teman juga ada sebagian ke Gubernur, Bupati, Walikota, ke pihak terkait, pihak perusahaan. Jadi kalo untuk kendala konfirmasi kalo saya pribadi tidak begitu sulit, intinya kita, informasi ini kan kita peroleh dan kita komunikasikan dengan pihak-pihak terkait, sehingga mereka mau menyampaikan.

**P : Bagaimana cara yang anda lakukan agar mendapatkan data yang akurat dari narasumber terkait kasus kebakaran hutan?**

**W :** Ya memang kalau berbicara data kita harus valid, kalau melihat jumlah titik api, tu biasanya kami di posko. Di badan penanggulangan bencana itu ada posko. Tiap hari kita cari informasi, kalo *gak* kami dikasih *printout* data titik api di kabupaten kota, jumlah pesawat yang diturunkan, jumlah *bom water* yang sudah dilakukan. Sebagian kawan-kawan juga ada yang turun ke lapangan melihat kondisi asap, titik api dan itu nanti dirangkum menjadi satu berita *headline* atau *second headline*.

**P : Bagaimana interaksi antara anda dengan redaksi terkait peliputan kebakaran hutan?**

W : Ini sangat kuat, karena di Riau Pos untuk berita-berita *headline* memang selalu dibahas, pembahasannya itu mulai dari tingkat reporter, korlip dibahas, dirancang segala macamnya. Nanti usulan kami itu dibahas lagi di rapat redaksi, ada redaktur, redpel sampai ke pimrednya langsung. Itu dibahas apa topik yang menarik pada saat itu dan yang akan datang.

P : **Anda kan meliput kebakaran hutan juga, liputan itu atas perintah dari pimred atau inisiatif sendiri ?**

W : Kalau kami liputan kan di BB ada group, kami juga punya rapat harian antara jam lima sampai jam tujuh malam, kecuali hari libur dan hari minggu. Jadi saat rapat itu kita bahas sesuai dengan posko masing-masing, korlip biasanya menanyakan itu, bagaimana perkembangan nya? apa kedepannya?. Usulan dari kami ini dibahas dirapat redaksi, itu liputan yang terencana. Tapi terkadang di lapangan ada suatu hal yang gak kita duga, misalnya, kita akan memprediksi akan mengambil data mengenai kebakaran hutan. Pada saat di lapangan ternyata kepala instansi atau pihak terkait mau turun, *naahh* itu kita langsung ikut kesana dan memantau. Dan setiap perkembangan yang kita peroleh di lapangan kita laporkan kemudian kita tindak lanjuti, kita tanya lagi ke pihak yang terkait. lebih ke *jobdeskription* yang diatur sedemikian rupa, sehingga memang data yang kita peroleh itu maksimal.

P : **Kalau dari jurnalisnya sendiri terkait kebakaran hutan, ikut berperan gak ?**

W : Kami mungkin harus tetap mengedepankan kode etik jurnalistik, artinya memang kami gak bisa ikut langsung, misalnya berkecimpung menyelidiki penyebabnya secara *detail* mungkin *enggak*. Tapi yang jelas kami sesuai dengan peran kami lah. Melihat informasi itu, mengapa bisa terjadi, siapa saja yang disana. Itu yang kami informasikan. Kalau untuk spesifik seperti kayak Jikalau Hari, WALHI, WWF mungkin kami *enggak lah*. Kami hanya sesuai

dengan peran kami, informasi kami kembangkan, memberi informasi kepada publik bahwa inilah kondisi *realnya*.

**P : Kalau ini kan termasuk jurnalisme lingkungan, kalau dari istilah-istilah lingkungan sendiri dan dilihat dari sisi penulisan beritanya ada istilah lingkungan yang masih awam, pembaca belum tau, kalau menurut anda bagaimana cara penulisan yang tepat agar pembaca tau ?**

**W : Biasanya kalau di Riau Pos kalau ada bahasa inggris atau bahasa-bahasa awam, itu kita *bold*, digaris miring atau kami biasanya kasih keterangan dalam kurung, misalnya *booming water* (penyiraman air) hujan buatan, koma red. Intinya tidak mengurangi substansi berita yang kami informasikan.**

**P : Kemarin saya dapat informasi juga dari pak ilham kalo di Riau Pos *gak* ada wartawan yang khusus lingkungan, *nah* itu anda sendiri kan juga meliput tentang lingkungan mengerti *gak sih* tentang istilah-istilah lingkungan, atau pernah ikut seminar *gitu* ?**

**W : Kebetulan saya kan kuliah saya kan di Manajemen Sumber Daya Perairan, Magister saya di Ilmu Lingkungan UNRI, jadi sedikit banyaknya saya juga punya *basic* lah. Karena saya menggeluti ini, Cuma saya sering diskusikan juga sama orang kantor, sama teman-teman saya yang mengerti lah tentang spesifikasinya lingkungan. Yang jelas yang kita informasikan itu memang untuk masyarakat awam. Jadi untuk bahasa-bahasa yang terlalu teknis kita minimalisir itu, ketika memang sudah tidak bisa lagi di elakan dan harus disampaikan ya disampaikan dengan kaidah-kaidah yang ada. Ketika itu bisa kita olah menjadi bahasa-bahasa yang mudah dikenal masyarakat ya kita atur aja gitu.**

**P : Ada *gak sih* misi-misi atau tujuan tersendiri dari jurnalis lingkungan untuk memberitakan kebakaran hutan ?**

W : Yang pasti, baik pribadi maupun instansi, kami dari Riau Pos, semangat kami memang selalu ingin di depan dari media-media yang lain, artinya memang kami selalu coba memberikan informasi pada masyarakat bahwa yang ini jangan sampai terulang lagi, artinya memang kita coba berfikir mengajak, bahkan kita selalu menyampaikan kepada instansi terkait itu kok ini terjadi lagi, selama ini kita dimana. jadi terkadang kami lebih ke pembelajaran kepada publik. Peran kami disana itu mengajak, lebih pada ke persuasife penanganannya, bagaimana kita meminimalisir ini jangan sampai terjadi lagi .

P : **Kalau dilihat dari fungsi media untuk informasi, edukasi dan mediator. Kalo dari wartawan sendiri bagaimana menjalankan tiga fungsi itu terkait kasus kebakaran hutan dan lahan?**

W : Kalau saya dan di tim juga melakukan hal yang sama. Terkait informasi kita lakukan, edukasi mungkin seperti itu yang kita berikan pembelajaran pada masyarakat, kalo mediasi, kita memang terkadang juga berperan mengajak bahwa pihak-pihak terkait itu terkadang ya terlepas dari peran kita sebagai jurnalis juga memberi masukan, kedekatan emosional kita sebagai narasumber, memberikan peluang kepada kita untuk memberikan masukan kepada mereka misalkan (pak kayaknya kita harus melibatkan ini lho ).

P : **Ada gak pedoman kerja jurnalis dalam meliput berita lingkungan?**

W : Spesifik mungkin enggak, tapi kita lebih kepada aturan main di Riau Pos dan ini tidak berlaku di spesifik lingkungan, karena liputan yang masalah hukum, pendidikan paling ketika itu menjadi isu yang menarik kita bahas pertama, kita cari masukan dari berbagai pihak untuk dijadikan pertimbangan sehingga liputan itu lebih terarah .

**P : Kalau berdasarkan datanya bagaimana wartawan menjaga akurasi keseimbangan objektivitas berita ?**

**W :** Kami biasanya lebih ke *record* dan sebagian teman-teman menulis data, dan terkadang meminta data secara langsung, jadi data yang didapat akurat, valid dan dapat dipertanggungjawabkan, untuk mengantisipasi itu paling sering kita *record*.

**P : Kalau dilihat *gak* ada keberpihakan wartawan atau Riau Pos sendiri ke perusahaan atau ke masyarakat ?**

**W :** Itu yang kami kedepankan. Kami memposisikan kami berada ditengah-tengah semuanya, baik perusahaan, masyarakat, pemerintah, penegak hukum dan aparat. Jadi memang kami tidak mau men-*jugde* si A si B salah atau benar. Kami memaparkan kondisinya *real*-nya di lapangan, jadi masyarakat bisa menilai. Kami hanya memaparkan sesuai dengan fakta, sesuai dengan kondisi di lapangan dan sesuai dengan data yang kami peroleh. Terlepas dari masalah masyarakat menilai Si A si B salah itu bukan urusan kita, yang jelas kita melaksanakan tugas memberi informasi secara valid.

**P : Itu kasusnya udah selesai ?**

**W :** Alhamdulillah tim kasutla yang sudah pulang awal November udah selesai , hampir tiga bulan dia disini

**P : Itu beritanya terakhir bulan apa ?**

**W :** Kalau tidak salah awal November, pasca itu kita juga sering *running* tapi tidak se-*intens* biasanya, misalnya langkah antisipasi, langkah himbauan dari BMKG, pengawasan titik api .

**Transkrip Wawancara Mendalam dengan Jurnalis SKH Riau Pos (Muhammad Ali Nurman)**

**P : Kapan kasus kebakaran hutan dan lahan tersebut terjadi ? mohon diceritakan bagaimana kasusnya**

**W :** Ada 3 orang yg diwawancarai ni, sekitar bulan Mei-Juni kebakaran hutan. Itu kami ada 3 orang yg *intens* meliput itu. Eka di poskonya, Mario di Pemprof (apa kebijakan Pemprof terkait itu), aku di masalah hukumnya, karena kebetulan aku ngeliputnya di hukum kriminal, di Polda, Kejari, Kejati. Jadi ketika terkait ini otomatis awalnya kan tentu yang dicari siapa yang bertanggung jawab terhadap ini ? Kita tanya sama polisinya, bagaimana pengembangannya, apalagi saat itu kan Kementrian Lingkungan Hidup melangsir ada 14 perusahaan yang harus bertanggung jawab. Itu kita tanya sama Polda. Polisi waktu itu belum menetapkan kalau perusahaan itu bersalah, polisi malah bertanya 14 itu siapa yang bilang ? Kementrian lingkungan hidup. Oiya kita akan dalaminya itu, kata mereka awalnya. Setiap hari kita pantau terus.karena kita kan sistemnya posko. Artinya selain berita itu kita jug harus produksi berita lain yg terkait posko kita. Tapi itu rutin ditanyanya, akhirnya Polda Riau menetapkan satu perusahaan sebagai tersangka, PT Adei Plantation, tapi hanya perusahaanya saja, orangnya belum. Tapi saat itu kita tanya, kenapa bisa gitu? Artinya, perusahaan itu ada *personnya* yang menyerahkan kebijakannya, perusahaan ini kan lembaga. Lembaga tujuannya tidak ada yang tahu. Hanya sekitar jarak berapa bulanlah dari penetapan itu, akhirnya polda Riau mengirimkan penyidik dari Direktorat Criminal Khusus dari Jogja. Saksi ahli lah, dari saksi ahli ditetapkan dua orang tersangka yaitu GM (*General manager*). Sejauh ini dari dua orang itu satu baru yang ditahap

dua. Artinya berkasnya lengkap, tinggal menunggu penuntutan di pengadilan di Pelalawan.

**P : Itu perusahaannya Indonesia atau perusahaan asing ?**

**W : Perusahaan asing, punya Malaysia kalau *gak* salah.**

**P : Kalau ngeliput kan butuh data yang benar-bener akurat dan valid, sebagai wartawan sendiri gimana *sih* biar cari data biar benar-bener valid, karena kan itu bakal di *publish* di koran dan dibaca orang banyak, gimana?**

**W : Kita sistemnya dari informasi yang di dalam, ada dua informasi yang kita dalam, apa kepastian tentang kasus. Ya itu tentang perusahaan, ada perusahaan yang kabarnya jadi tersangka, kita kejar. Kalau kami biasanya ke Humas Polda kordinasinya, bagaimana konfirmasinya. Tanyakan nama perusahaan nya. Berjalan, kabarnya dua orang ditetapkan tersangkanya. Kalau polisi kebiasaannya kan sebelum berkas ini masuk ke pengadilan mereka tidak pernah membuka ungkap-ungkap. Siapa nama panjang orang itu (latar belakangnya *gak* dibuka), paling hanya inisialnya siapa, warga Negara apa, umurnya berapa.**

Karena mereka ini warga negara asing setelah dia tertangkap tentu ada yang mengikuti, yaitu dia di cekal, *nah* untuk mendapatkan data tentang dia, kita konfirmasi ke imigrasi, dari imigrasi lah ketauan nama lengkapnya.

**P : Ada kesulitan *gak* mas buat dapat narasumber?**

**W : Kalau sejauh data biasanya kalau belum puas dengan satu narasumber, kita cari narasumber yang lain sebagai perbandingan.**

**P : Narasumbernya sendiri susah atau tidak untuk diwawancarai?**



W : Sejauh ini *gak* susah, karena sistemnya sebenarnya posko, kecuali mungkin kalau wartawan nasional yang disini, dia kan sendiri, dia yang megang semuanya, berarti dia kesini, kemana-mana segala macam. Kalau kami, kayak PT ADEI PLANTATION yang ditetapkan sebagai tersangka ini kan daerah operasinya di Pelalawan otomatis kami yang di pekanbaru tidak memikirkan kondisi di Pelalawan bagaimna. Itu orang pelalawan lah yang tau.

P : **Kalau misalkan ni. kita butuh data tentang ini, tapi narasumbernya itu *gak* mau di wawancarai, susah ditemui, padahal kita benar-benar butuh, itu bagaimana ?**

W : Pertama, upaya konfirmasi kan harus ada, biasanya kita punya nomor kontaknya, kalau orangnya ditelepon, disms *gak* jawab, cari tau siapa yang megang kasusnya, karena semua bekerja berdasarkan fungsi tugasnya masing-masing, kalau masalah kebakaran hutan kan Direktorat Criminal Khusus di Polda Riau, pergi kesana gitu. Kalau *gak* dapat juga kita harus menjadikan kawan anggota-anggotanya, secara global *sih*, informasi bisa dari mereka juga. Kita tanya sama anggotanya (ini gmna?), hal ini harus dikonfirmasi (kabarnya ini *kayak* gini ya), kalau kita sudah punya data, kita tanyanya enak, masalahnya kalau kita *gak* punya data, kalau kita tanya ya bakalan gitu, ada pertentangan kerja lah. Kalau wartawan mau buka seluas luasnya kan, kalau polisi membuka seperlunya saja.

P : **Berarti intinya ada *kroscek* lagi dengan narasumber lain?**

W : Ya intinya seperti itu, fungsinya dasar aja *sih* sebenarnya memang.

P : **Jadi untuk mengatasi kesulitan itu, tanya kontaknya, langsung hubungi,. kalau dari anda sendiri, solusi yang ditawarkan apa terkait kasus kebakaran hutan dan lahan ?**

W : Harusnya dievaluasi perusahaan-perusahaan yang ada disini, artinya kalau sudah misalnya kayak perusahaan dijadikan tersangka, otomatis kan ada keputusan bersama, artinya perusahaan yang dianggap salah ini bukan orangnya saja, kan ada dua proses ni :

Perusahaan ditetapkan jadi tersangka, artinya secara *general* ini perusahaan salah, setelah itu baru ditetapkan dua pimpinan jadi tersangka kan, artinya keberadaan perusahaan ini kan dievaluasi.

P : **Itu sebenarnya kebakaran hutan itu karena sengaja dibakar atau karena kebakar karena panas?**

W : Jadi kasus kebakaran di Riau kemaren ini, perusahaan nya cuma satu dan itu satu-satunya sampai sekarang jadi tersangka. Ada tersangka-tersangka perorangan, kalo di cari ada tu. Kalo data aku *gak* hafal, tapi ada. Rata-rata mereka membuka lahan, membuka lahan kalau dengan tata cara umum sekian ratus hektar kan biaya akan mahal. Maka pakai jalan cepat lah mereka, *bakar*in aja pakai minyak, disiram.

P : **Kalo dari Riau Posnya sendiri ikut berperan *gak* terkait kasus ini, misalkan menawarkan solusi apa gitu?**

W : Sebenarnya fungsi media itu harus bisa menawarkan solusi, tapi kan tidak secara langsung medianya yang *ngomong*, kita cari siapa orang yang berkompeten untuk itu. Kan bisa minta buah pikiran dari ahli, misalnya pakar lingkungan, lalu kita suguhkan ke masyarakat, siapapun lah nanti masyarakat yang membaca itu. Karena kan diantara pihak-pihak yang berwenang terhadap masalah kebakaran hutan ni kan tidak langsung berkomunikasi, dinas kehutanan misalnya, kan tidak langsung berkomunikasi dengan kapolda. (ada mungkin yg mau disampaikan dinas kehutanan tentang solusi ini tp tidak bisa langsung ke kapolda, lalu melalui siapa? Ya sudah melalui media saja, gitu.).

**P : Kalau Riau Pos sendiri menanggapi permasalahan lingkungan kebakaran hutan dan lahan ini gimana ?**

**W :** Ini penting, malah sampai beberapa terbitan jadi halaman satu terus. Sampai akhirnya ada wartawan Riau Pos yang angkat tentang kebakaran hutan ini, juara tiga di lomba penulisan di KLH itu, redaktur dia. Itu penting karena untuk masyarakat dan isunya sudah nasional dan bencana nasional. Makanya harus ada yang disangkakan . kalau Cuma orang per orang tidak akan separah itu asapnya. Maka dicarilah siapa yang bertanggung jawab terhadap itu.

**P : Itu yang dibakar daerah mana aja ?**

**W :** *Searching* dulu. Itu isu besar, *gak* akan orang per orang yang menggarap , intinya kerja tim.

**P : Kalau dari sisi penulisan beritanya sendiri, ini kan jurnalisme lingkungan, kan banyak pembaca yang masih kurang *ngerti* tentang ada bahasa-bahasa yang mungkin masih belum dimengerti orang, itu bagaimana cara mengatasinya agar pembaca *ngerti* ?**

**W :** Wartawan itu harus mengerti dulu apa yang dia tulis, bentuk sederhana dalam masalah itu yang paling dimengerti masyarakat. Harus seperti itu dikemasnya.

**P : Kalau di Riau Pos sendiri, ada *gak* wartawan yang khusus tentang lingkungan? *nah* kalau anda sendiri kan ini tentang kebakaran hutan otomatis kan ada istilah-istilah lingkungan yang mungkin agak kurang dimengerti, pernah dapat *kayak* misalkan pelatihan khusus *gak* tentang jurnalisme lingkungan ?**

**W :** *Gak sih*, Cuma ya kita harus proaktif, cari tau apa yang tidak kita tau, kita cari tau sendiri (*googling*).

P : **Kalau berita tentang kebakaran hutan nya sendiri tu sekarang sudah *gak* muncul, tapi yang penetapan tersangkanya itu yang masih muncul atau tidak ?**

W : Iya, karena tidak ada masa kadaluarsanya, penyidikan itu kan berproses, penuntutan sampai di persidangan.

P : **Sekarang juga masih berlanjut ?**

W : Masih, karena diantara dua orang ini, baru satu yang berkasnya lengkap untuk penuntutan.

P : **Kalau untuk menulis berita-berita lingkungan ada kesulitan *gak* ?**

W : Sulit itu kan tergantung persepsi kita aja sebenarnya, anggap aja tantangan. Gambarannya, kita kan harus bertanggung jawab untuk memberikan informasi pada masyarakat, gimana caranya kita harus *ngerti*. Kalau kita *gak ngerti*, gimana kita bisa buat masyarakat *ngerti*.

P : **Kalau kasus kebakaran hutan dan lahan, anda liputan atas inisiatif sendiri atau perintah dari pimred ? hubungan antara wartawan dengan pimrednya itu gimana ?**

W : Ya *kayak* aku bilang tadi, kita ini kan penugasan berdasarkan prosedur. kebetulan kasus ini kan ada kaitan dengan masalah hukum, artinya kebakaran hutan ini kan masalah artinya ada pidana yang mengikutinya, pidana itu kan bisa dikenakan kepada siapa saja, yang menangani ya penegak hukum kan, polisi, jaksa. Itu aku liputannya langsung aja ke polda. Setiap hari kita kan *nyari* informasi ni. Aku rasa tidak harus diperintah lah. Cuma ada informasi kita kejar. Karena kan informasi itu bisa dari mana saja. Bisa kita dapat dari narasumber, bisa dari kabar angin yang belum dapat dipastikan dari bocoran-

bocoran. Kalau aku *gak* terlalu banyak *sih*, Cuma mantau masalah hukumnya saja.

P : **Saat ini masih liputan tentang kasus itu ?**

W : Iya mantau terus, Cuma terakhir minggu lalu baru ditahap dua kasusnya, berkasnya lengkap untuk penuntutan.

P : **Disini lagi liputan apa ? (POLRES)**

W : Lagi buat berita, kalau ke kantor jauh. Kalau tugas jurnalistiknya *tu* sama aja *sih* sebenarnya , objek peliputannya aja yang berbeda-beda

P : **Kalau anda sendiri ikut *gak* turun ke lapangan, memantau kebakaran hutan ?**

W : *Gak*, karena kita terikat posko, kalau kita pergi siapa yang jaga posko? Sementara ada kewajiban membuat berita lain juga. satu hari paling tidak 5-6 berita minimal dan harus berita yang berbeda.

P : **Ada *deadline* juga ?**

W : Iya, *deadline* sore, setiap hari. Karena Riau pos itu terbitnya ada 44 halaman.

P : **Itu kebakarannya kan udah sering, selama sering terjadi kebakaran itu selalu ngeliput tentang kebakaran *gak*?**

W : Aku jadi wartawan baru tiga tahun, baru satu kali kemaren yang besar-besaran, yang ikut liputan ini ya baru kali ini. kalau yang ke lokasi kebakaran cuma yang kecil-kecil, sekitar kota, polisi kan ada juga bantu turun,naik mobil *water canon* itu, kalau yang posko penanggulangannya langsung kan mereka pakai helikopter. Ya bekerja sesuai fungsi aja. Kalau aku mantau masalah hukum kriminalnya. kalau terus mantau kesana, kan sudah ada Eka, sudah ada *jobdesknya* masing-masing.

**P : Sebelum kerja di Riau pos kerja dimana ?**

**W :** Sebelum itu kuliah, aku sama Eka sama masuk Riau posnya. Kalau wartawan baru sih awalnya *gak* langsung di tempatkan di Polda, *kayak* aku awalnya di polsek-polsek. Wartawan harus punya jaringan yang luas, jadi dia tau. Kita wawancara pun tidak bisa langsung, kita harus tanya kan ulang, apakah orang tersebut yang menangani kasusnya. Kalau dilihatnya kita tidak cakap, dia menghindar-menghindar. Karena kita wawancara cari tau dulu sama teman-teman wartawan. lalu kita telepon aja, (pak mau tanya masalah ini), kalau itu kewenangan dia, pasti akan langsung dijawab, tapi kalau itu bukan kewenangan dia, pasti dia akan jawab, itu tidak kewenangan saya. Kalo instansi itu pasti ada Humas, yang awal tu pasti kita ke Humas, tanya tentang masalah ini, mau jumpa dengan orang yag terkait dengan hal ini.

**P : Kalau misalkan itu kasus kewenangan dia, tapi dia *gak* mau *ngasih* informasi, bagaimana?**

**W :** oo bagus sekali, ada yang ditutupi itu pasti masalah. Masalah ini kita mau tanyakan tentu kita sudah punya latar belakang. Kita coba kontak dia. Ditelepon *gak* jawab, disms *gak* balas, ya udah untuk konfirmasi kita buat itu. Masalahnya berita kita kan hak jawabnya nanti ada. Kita kejar dia bukan karena hak dia pribadi tapi karena itu kewenangan dia, atas dasar tugas dan jabatan dia, makanya dia pun harus menjawab. Rata-rata pejabat sekarang sudah banyak yang *ngerti*, walaupun dia belum siap (nanti dulu ya atau tunggu sebentar aku cari informassi lengkapnya).

Kalau *kayak* kami di Riau pos itu ada jurnalisme akomodatif, kita mengakomodir orang, artinya sesalah apapun orang, dianya harus ditanya apa sebenarnya permasalahannya. Karena permasalahan itu kan tidak muncul dari ruang hampa, berita yang menjual itu kan berita masalah.

**P : Kalau anda sendiri pernah *gak ngalamin* seperti itu, misalnya *nyari* orang tapi *gak* bisa ditemui terus ditulis seperti tadi, tapi narasumbernya itu protes dan menggunakan hak jawabnya?**

**W : Ada yang marah-marah aja, karena diberitakan, *gak* ada hak jawab, ya udah *gak* apa-apa.**

**P : Ada *gak* yang sampai nuntut karena pemberitaannya tidak benar ?**

**W : Sampai somasi belum pernah sejauh ini.**

**P : Kalau Riau Pos sendiri lebih pro kemana *sih* dalam hal pemberitaannya?**

**W : Kita akomodatif, mengakomodir.**

**P : Kalau mau liputan kan ada persiapan-persiapan tersendiri, dari mulai liputan sampai berita dikirim. Itu ada persiapan khusus *gak* saat akan meliput berita kebakaran hutan ini ?**

**W : Setiap pagi kebiasaan wartawan tu baca-baca, apa yang bagus, informasi sekecil apapun dalami-dalami. Persiapannya paling, mulai bekerja dengan pikiran yang jernih.**

**Transkrip Wawancara Mendalam dengan Jurnalis SKH Riau Pos (Eka Gusmadi Putra)**

P : **Kapan kebakaran hutan dan lahan itu terjadi ?**

W : Awal Juni, ya awal Juni karena *dah* kemarau kan

P : **Beritanya muncul mulai bulan Juni sampai kapan mas ? bisa diceritakan awal kasusnya?**

W : Awal Juni, *dah* mulai kemarau awal-awal itu *kan*. Itu mulai banyak lahannya kebakar. Itu pakai puntung aja udah kebakar *kan* karena lahan-lahan di Riau ini lahannya *kan* gambut, jadi itu dimanfaatkan sama ini, sama orang yang buka lahan untuk perkebunan. Kebanyakan sawit, terus karet. Jadi ada yang perorangan ada yang perusahaan memang. Cuman mereka memanfaatkan orang gitu untuk membakar.

P : **Itu memang sengaja dibakar gitu ?**

W : Itu ada yang disengaja. Itu tadi yang buka lahan. Makanya sampai sekarang *kan* masih ada beberapa tersangka. Terus dari awal Juni, pertengahan Juni itu mulai terasa kabutnya. Aku karena baru buat kaledoskopnya jadi masih sedikit ingat. Waktu 21 Juni pokoknya ributlah . Tanggal-tanggal belasan, 17, 18 dah mulai anak-anak sekolah *diliburin*, terus data Dinas Kesehatan juga sudah banyak masyarakat yang terserang ISPA, itu sudah merata diseluruh kabupaten kota di Riau.

Tanggal 20 *kan* pemberitaan di Singapore mulai menentang SBY tu *kan*, *dah* mulai sampai Malaysia, Singapore, Filipina dan sebagian Thailand *kan*. Terus dari 21 disini rapat. Semua *tu*, Wakil Gubernur, Danrem, Danlanud, Kapolda. Jadi ditetapkan waktu itu tanggap darurat asap *kan* statusnya itu. Sorenya



habis rapat itu, tiga menteri kesini langsung *tu*, Gamawan, Agung Laksono sama Menteri pertanian Kuswono, sama kepala BNPB. Dari situ mulai dibuka posko disana, di Lanud TNI AU Roesmin Nurjadin namanya. Disitu ada posko, *nah* disitu ada penanganan bom air, terus teknologi modifikasi cuaca sampai 20 hari.

P : **Itu kebakarannya di daerah mana aja mas ?**

W : Hampir seluruh Kabupaten *tu*, Bengkalis, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Pelalawan, Pekanbaru, Siak, lebih ke arah sini sih, ke pesisir. Cuman setelahnya menyebar juga Inhu (Indra Giri Hulu), Inhil (Indra Giri Hilir), Kampar, Kuansing.

P : **Masnya juga ikut terjun langsung ke lapangan ?**

W : Sempat ikut yang nyemai garam itu *kan*, yang ikut bikin hujan buatan, terus sempat turun ke Pelalawan juga, ya beberapa kali lah. Tapi yang jelas *stanbay* di posko penanggulangan bencana itu di TNI AU, karena beritanya harus rutin *kan*, harus di *follow up* terus, dari hasil penanganannya *gimana sih*, dari yang titik api awalnya tanggal 20 sampe 90an *kan*, semakin nurun, terus tanggal 5 udah mulai nol titik apinya, 5 Juli.

Tapi beres Juli ,masuk Agustus, pertengahan Agustus ada lagi, kebakar lagi. Itu lebih banyak di Pelalawan, Inhu sama Bengkalis, Siak. Itu sempat ada penanganan. Iya ini yang paling parah *kan* dari 2007. Sampai ke Malaysia juga *kan*. Ya kayak ada siklus *gitu*, siklus lima tahunan hehehehe. Ya mungkin *entah* iya *entah* tidak terlepas dari unsur politiknya, jadi bergening politik itu *kan* untuk buka lahan. *Emang* kebakaran juga, cuman *emang* yang paling parah. Jadi *kayak* Pelalawan yang dekat aja *kan* , mulai dari gerbang masuk itu sudah kebakar semua, Rohil juga. Kebetulan juga waktu itu kata BMKG asap itu mengarah ke Singapore, sampai ke Malaysia.

**P : Bagaimana permasalahan yang dihadapi ketika menjalankan tugas jurnalistik, khususnya terkait kebakaran hutan di Riau?**

**W :** Dari awal *emang* sudah kendala *sih*, kenapa? Karena poskonya di AU. *Kan* tau wartawan sama TNI AU kan pernah dulu waktu Sukhoi jatuh, pesawat tempur itu jatuh. Sejak itu hubungan sudah tidak baik. Masuk saja kami harus diperiksa dengan tepat, KTP ditinggal, *ngisi* absen. Itu kendala awal. Tapi karena dari BNPBnya ini menjadi isu nasional, BNPB yang *back-up* untuk berangkat mau nyemai. Cuman waktu itu *ngebom ndak* bisa, karena terbatas kan, karena helikopternya sendiri bawa beban air 2000an liter, kalau kendala peliputan herkulesnya sendiri kan, herkules ketinggiannya *kayak gitu*. Kita *gak* pernah kan, karena diatas kan nyari awan yang benar-benar awan bisa dijadiin hujan. Jadi naik *ni* 1500 misalnya kan, *gak* ketemu awannya, naik lagi sampai ketempat yang kekurangan udara gitu. Itu kalau di udaranya.

Kalau di lapangannya pasti medannya, karena cenderung pemadaman itu tidak yang dipinggir jalan kan itu, harus masuk kedalam, karena hawanya sendiri udah panas.

**P : Masnya sendiri pernah masuk *gak* ?**

**W :** Iya, kami pernah investigasi sama fotografer

**P : Itu kan sulit banget, bagaimana cara mengatasi kesulitan-kesulitan yang datang pada saat melaksanakan tugas sebagai seorang jurnalis lingkungan ?**

**W :** Sebenarnya kebakaran hutan dan lahan tugas sebagai peliput juga gitu, yang juga ditugasi kantor, ya *kayak* ke lapangannya gitu ya bisa diatasi aja *sih*. Paling memang tidak sebentar, butuh waktu. Misalnya *gak* bisa selesai hari ini, konfirmasi lagi ke kantor belum dapat bahannya terus *nginap* dulu gitu. Minta waktu aja *sih*.

P : **Karena ada *deadline-deadline* gitu ya ?**

W : Iya, paling bahan seadanya sampai disitu aja, paling konfirmasi terbatas aja sama kepala BPPD sini *by phone* gitu.

P : **Ini *kan* termasuk jurnalisme lingkungan *kan* ya. Kalau dari dari jurnalisme lingkungannya sendiri ada *problemnya* *gak*? *Kan* *gak* secara umum, misalnya kayak politik sendiri, *kan* beda-beda kesulitannya. Kalau di lingkungan sendiri ada kesulitan tersendiri *gak* saat *ngeliput*?**

W : Dari lingkungan, kesulitannya kita *ngadepin* asap, rentan dengan Ispa. Pada waktu itu indeks Ispu itu sudah jauh di atas dari yang awalnya 230 standartnya, ini sudah sampai 350-400. Dan bukan untuk pribadi juga, tapi untuk Riau keseluruhan, untuk flora dan faunanya juga. Masyarakatnya juga memang sudah tercemar. Kementerian Lingkungan Hidup juga langsung turun waktu itu *kan* .

P : **Kalau dari sisi penulisannya sendiri, itu *kan* ada istilah-istilah khusus juga *kan* kalau di lingkungan, seperti Ispa, Ispu. Itu *gimana* ?*kan* ada tu pembaca yang kurang *ngerti* tentang istilah-istilah gitu, *nah*, masnya sendiri *gimana* nulisnya biar pembaca itu *ngerti* maksudnya ?**

W : Ya kalau misalnya bahasa awam *gak* apa-apa *kan* dituliskan langsung. Cuma kalau ada istilah dari lingkungan hidup atau dari tulisan mengenai itu, paling dikasih penjelasan aja setelahnya. Misalnya Ispu itu tadi, ya dijelasin aja beberapa kata gitu, Ispu itu apa *sih* gitu, kenapa lahan gambut itu mudah terbakar, dan segala macam. Paling kalau aku *gak* tau istilah itu artinya apa dan narasumber tidak bisa jelasin pada saat itu juga, paling ya *searching*, karena memang banyak bahasa baru.

P : **Untuk jurnalisme lingkungan sendiri ada pelatihan khususnya *gak* mas, *kan* itu tadi ada bahasa-bahasa awamnya?**

W : Untuk pelatihan khusus seperti itu tidak ada. Cuma kalau seminar atau worksop gitu mengenai lingkungan yang diadakan oleh BKSDA sering ikut.

P : **Jadi sedikit *ngerti* lah ya tentang istilah-istilah gitu ?**

W : Sedikit memahami. Ya itu tadi kalau benar-benar belum ngerti dan belum paham ya *googling*.

P : **Bagaimana solusi yang ditawarkan terkait kasus-kasus lingkungan yang terjadi, khususnya kebakaran hutan dan lahan yang belum lama ini terjadi di Riau?**

W : Emang harus ada regulasi yang jelas sebenarnya untuk masyarakat atau perusahaan yang membuka lahan gimana *sih* gitu. Misalnya mereka punya areal 1000 hektar gitu, yang untuk penanamannya 500 hektar. Cara untuk membuka lahan itu harus jelas gitu. Harus ada regulasi dari Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian, Kementerian Perkebunan, semuanya harus bersinergi gitu. Jadi dengan gitu kan, kata Siswono juga kan waktu itu ada cara lain untuk membuka lahan selain membakar, tidak dengan membakar gitu. Bisa dengan menggunakan alat berat dan segala macam. Cuman kan kendalanya bagi perusahaan atau masyarakat yang pengen berkebun itu, biayanya jauh lebih mahal. Kalau pakai api kan tinggal siram aja pakai bensin habis. Tapi kalau ada regulasi kan bisa jelas, Polda juga bisa nindak tegas. Karena rata-rata dari belasan tersangka dalam kebakaran kemarin itu perusahaan Malaysia, makanya kalau Riau sendiri menangani ini gak mungkin bisa. Ini butuh sinergi dari semua kementerian.

P : **Sekarang masih berlanjut *gak* kasusnya itu ?**

W : Masih, sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka

P : **Kalau kebakarannya sendiri masih ada atau tidak ?**

W : Untuk kebakarannya sendiri sudah tidak ada, kan musim hujan. Tapi untuk Riau sendiri sudah ada kemajuan sih. Karena kemarin sudah disahkan juga perda tentang bencana alam. Dari perda itu nanti Riau sendiri sebelum musim kemarau, sebelum kebakaran itu sendiri terjadi bisa dilakukan penanganan. Lewat sosialisasi atau penjelasan kepada perusahaan untuk tidak membuka lahan dengan membakar. Baru disahkan kemarin 25 November.

P : **Itu beritanya terakhir bulan apa mas ?**

W : Ya yang 10 Juli posko ditutup , terus udah mulai pelacakan tersangka, titik api sudah *gak* ada. Di pertengahan Agustus kebakaran lagi, tapi bukan yang di lokasi pertama. Pindah lokasi kebakarannya.

P : **Pertengahan Agustus sampai kapan ?**

W : Sampai 31 Agustus, karena kan BNPB masih pakai helicopter. *Dah* masuk September udah *gak* ada lagi, curah hujan udah mulai turun lagi

P : **Bagaimana peran serta Riau Pos dan Jurnalis Lingkungan terkait kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau ?**

W : Ya perannya paling sebagai media kontrol sosial , memberitakan saja dan memang kami selalu menempatkan itu di halaman satu, di *headline*. Terus kan Riau Pos dibaca oleh masyarakat, pejabat, segala macam. Dari situ aja sih berharap *follow up*nya terus. Kan karena grup Jawa Pos, jadi yang besar-besarnya tetap dinaikkan di JPNN, selain di *online* dan di Koran. Kan isunya menyangkut SBY, pasca dia minta maaf sama Singapore.

P : **Riau Pos sendiri *concern* gak sama masalah-masalah lingkungan ?**

W : Ya *concern*. Tiap minggu kan kita siapkan halaman *save the earth*. Tiap minggu kan ada itu.

**P : Setiap minggu pasti ada ?**

W : Ada, pasti ada. Semua tentang lingkungan. Ada tim minggunya.

**P : Anda sendiri ikut nulis di halaman *save the earth* gak ?**

W : *Nggak*. Senin sampai Kamis *tu* dia keliling, Jumat, Sabtu baru *deadline*.

**P : Bagaimana cara Riau Pos menanggapi dan memahami permasalahan lingkungan khususnya kebakaran hutan dan lahan yang sudah sering terjadi di Riau ?**

W : Lewat pemberitaan aja *sih* sebenarnya. Tapi tim minggu juga setiap mereka bergerak ke lapangan itu selalu mengajaklah. Mengajak perusahaan agar tetap perduli. Karena kan kalau tidak ada peran media juga akan jauh lebih parah *sih*.

Karena gampang benar disini dirusak. Kalau ada kemarau ya udah, tinggal lempar puntung rokok aja bisa kebakar ribuan hektar kalau *dibiarin*. Satu lagi keterbatasan Riau juga kemarin, *gak* ada peralatan yang cukup, jadi harus minta bantuan.

**P : Kalau di Riau Pos ada *gak* jurnalis yang khusus lingkungan ?**

W : Paling ya tim minggu, karena yang harian tiap tahun pindah-pindah. Harus *nguasain* semua. Gak ada wartawan khusus. Paling yang ada ya wartawan budaya. Kalau lingkungan ya lihat situasinya aja. Kalau memang *scopenya* propinsi ya aku.

**P : Bagaimana cara yang dilakukan agar mendapatkan data yang akurat dari narasumber terkait kasus kebakaran hutan dan lahan ?**

W : Ya gerak ke ini aja, ke BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), terus ke BLH (Badan Lingkungan Hidup), yang punya data itu *sih* dua itu,

sama dinas perkebunan dan kehutanan. Kalau misalnya pengen data tentang ISPU minta ke lingkungan hidup. Pengen minta tentang data yang terserang ISPA misalnya minta ke kesehatan, gerak-gerak gitu aja.

**P : Itu mereka *ngasih* atau ada kesulitan-kesulitannya untuk *dapetin* data itu ?**

**W :** Ada, kadang banyak alasan untuk yang berkompeten memberi informasi itu tidak ada, nanti telepon kepala dinasnya aja.

**P : Wawancara via telepon gitu ?**

**W :** Telephone, minta arahan kepada kepala dinasnya, minta data kemana *ni*, biar dia yang delegasikan. Kalau udah kepalanya yang bilang kan, udah ikut aja orang. Karena kalau minta Gubernurnya kan, waktu itu gubernurnya di KPK, jadi wakilnya. paling kalo *mentok* gak dapat, sementara *deadline*, minta ke wakil gubernur.

**P : Itu pasti dikasih atau tidak ?**

**W :** Dari gubernur dimintakan ke anggota-anggotanya.

**P : Wakil gubernur itu pasti mau untuk diwawancarai ?**

**W :** Kalau untuk yang kasus Karhutla kemarin ya mau. Kalau isu publik biasanya mereka mau *ngasih*.

**P : Jadi *gak* terlalu banyak kendala ya ?**

**W :** *Nggak*, BMKG juga untuk titik api mereka mau *ngasih*

**P : Anda sendiri *kan* ikut *ngeliput* kebakaran hutan dan lahan, itu perintah dari pimred atau inisiatif sendiri untu meliput ?**

W : Untuk turun di lapangan seringnya inisiatif. Karena kan pasokan berita harus tetap terjaga. Inisiatif aja. Misalnya bang aku ikut nyemai ya, beritanya gimana? Aman

P : **Jadi *gak* harus diperintah untuk liputan ?**

W : *Nggak*, yang jelas jaga posko aja, kalau isunya propinsi ya itu kewenangan ku. Selesai liputan langsung kirim berita *by email*, *gak* mesti ke kantor. Kalau lagi liputan gini ada rapat kan *gak* mungkin ke kantor. Apalagi kalau yag di Pelalawan kan *gak* mungkin ikut rapat.

P : **Rapatnya mingguan atau gimana ?**

W : Rapatnya sebenarnya tiap hari. Cuman ya itu tadi kalau kita *gak* bisa ke kantor ya tinggal bilang aja karena liputan *gak* bisa ke kantor, berita kirim aja.

P : **Kalau kebakaran yang sebelumnya ikut *ngeliput* juga ?**

W : Kalau kebakran yang 2012 aku *gak ngurusi*. Ya itu tadi, kita dipindah-pindahin tiap tahun biar menguasai semua, *gak* ada yang khusus, yang tim minggu juga. *Kayak* aku gitu, udah *ngerasain* semua posko, nanti ditarik tim minggu. Itu kan ada liputan khusus juga, ada liputan *for us* juga.

Ya kendalanya itu aja, ya sebagai jurnalis juga sebenarnya *gak* ada yang bisa jadi kendala. Kalau *gak* bisa narasumber yang ini, cari narasumber lain. Kalau *deadline* memang datanya Cuma segini ya kita bilang nanti bisa di *follow up* lagi.

P : **Sebelum liputan ada persiapan-persiapan khusus *gak sih*? Misalnya mau kemana, mau wawancara siapa, cari data kemana. Dari persiapan liputan sampai pengiriman beritanya ada kendala *gak* ?**



W : Kita lihat isu hari sebelumnya sama hasil rapat sore, jadi bisa tau. Kalau misalnya *gak* ada *moment* besar. *Follow up* yang hari ini. misalnya hari ini di halaman satu atau halaman pro otonomi itu masalah pembatasan lima desa, misalnya *gak* ada penjelasan, *follow up* aja ke propinsi.

P : **Kalau kebakaran hutan kemarin dari Juni, Juli, Agustus, itu liputannya setiap hari atau gimana ?**

W : Ya setiap hari. Ya *progress* penanganannya lah ya, terus misalnya hari ini berapa yang di bom, hasilnya, terus besok rencananya kemana, gimana hasil seminggu. Terus dilihat dari aspek lain, lingkungannya gimana, sudah berapa yang terbakar, *follow up*nya gimana. Gitu aja *sih* kalau peran Riau Posnya sendiri.

P : **Jadi hampir setiap hari berita kebakaran muncul di *headline* ya ?**

W : Iya, dari tanggal 20 Juni samapai tanggal 5 Juli lah, sekaligus fotonya.

P : **Fotografernya ikut juga atau anda sendiri ?**

W : Ya fotografernya ada.

P : **Kalau Riau Pos kan media lokal. Biasanya ada kedekatan tersendiri pada masyarakat Pekanbaru, Riau. Gimana *sih* biar masyarakat itu percaya dengan pemberitaan Riau Pos? dari sisi penulisan beritanya sendiri gimana, kan masyarakat butuh banyak informasi perkembangan kasus kebakaran hutan dan lahan?**

W : Ya ini aja *sih*, menyajikan berita yang *real*. Kan pernah turun di lapangan, jadi tau menyajikan berita menurut masyarakatnya aja gimana. Bagaimana *ngerasain* kebakaran hutan. kan sampai ada korban kan, sampai ada yang meninggal. Ya turun ke lapangan terus. Ya menyajikan tulisan yang

menunjukkan empati lah ya dalam penulisannya. Mencoba di posisi masyarakat. Terus diambil *statement* dari pemerintah untuk penanganannya.

P : ***Gak* berpihak ke salah satunya ?**

W : *Gak*. Ya itu juga gunanya turun ke lapangan, tau kondisi *realnya*. Karena *omongan* pejabat, *omongan* tim di posko itu kan yang oke-oke aja kan, gimana *realnya* di lapangan mereka *gak* mau menyebutkan. Selain itu juga karena Riau Pos punya wartawan diseluruh kabupaten, jadi penyajiannya bisa berimbang. 12 Kabupaten kota ada.

P : **Kalau disini sendiri ada berapa wartawannya ?**

W : Pekanbaru yang di lapangan ada belasan. Gak sampai 15 sih. Pemberitaan satu wilayah bukan aku sendiri, tapi keroyokan. Tapi yang konsen di posko aku. *Kayak* yang di Polda ya harus *follow up* yang disana.



[illegible]

**www.majalah.riapos.co** **Edisi 181**

**FAKTUAL, GEBAS, PERTAMA DI RAU**

## RISIKO MENCINTAI PEWARIS LANGGAI

Di tepi perairan Selat Melaka mereka berdiri, larut malam hingga dini hari, andalkan langka menjemput rezeki. Hasil yang dicapai tak sebesar risiko yang mengintai.



**RESEKSIAN**  
**GEN BIANC GEMUK**  
 LITIGASI  
 BANTAI AIR KUPU-KUPU KE ISTANA

**SERBI BUDHIS**  
 - JUKUT YANG TERPAKAR BIKIN  
 - ISKENC ROUTE

## Pengadaan Tower Inhu Dianggarkan Dua Kali

**PEKANBARU (RP)** — Dugaan korupsi proyek pembangunan tower sistem administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) kembali disidang. Senin

Hulu (Inhu) kembali disidang. Senin (26/8) di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru. Terdakwa mantan Kadisdukcapal Inhu Zulklifi Sukiman diduga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp960 juta. Saksi yang dihadirkan mengatakan pengadilan proyek ini dianggarkan hingga dua kali.

"Dianggarkan dua kali. Anggaran pertama Rp7,67 juta dan anggaran kedua Rp706 juta," ujar saksi dalam persidangan yaitu Direktur CV Koprak Teknologi Hardani yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Rengat Adani SH.

☞ Baca Pengadaan Halaman 32

**12 September,  
Kloter 4 JCH  
Masuk Asrama**

**PEKANBARU (RP)** — Persiapan penyelenggaraan haji tahun 2013 terus berjalan. Dijadwalkan, 12 September mendatang, jamah calon haji (JCH) Kloter 4 Embarkasi Batam sudah masuk as-

"JCH Riau dimulai dari kloter empat. Tanggal 12 September sudah masuk asrama. Sementara berangkat (ke Madinah, *rofl*) tanggal 13 September. Sampai seluruh kloter dari Riau," ujar Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, H Aziz melalui Kasid Pendiffaran dan Dokumen Haji H Defizun kepada *Riau Pos*, Senin (26/8).

Dia menambahkan untuk kloter empat tidak sepenuhnya berasal dari Riau. Di mana, perwakilan JCH hanya berjumlah 230 Kloter. Sementara sisanya berasal dari JCH Provinsi Jambi. Untuk kloter satu berasal dari Kluter Kepulauan Riau, kloter dua dan tiga berasal dari Jambi.

☞ Baca Sumbawa Halaman 29

☞ Baca 12 September Halaman 32

ASAP: Wilayah Kota Pekanbaru diselimuti kabut asap, Senin (26/8/2013).

# Riau Belum Bebas *Hot Spot*

Laporan MARRIO KISAZ  
dan AGUSTIAR, Pekanbaru  
redaksi@riaupos.co

merilis bahwa untuk jumlah titik panas di Riau mengalami naik turun. Hal ini berdasarkan monitoring satelit NOAA 18, tiga hari belakangan, terhitung Sabtu (24/8) hingga Senin (26/8).

Disebutkan ketua kelompok analisa BMKG Warih Budi Lestari kepada Riau Pos, Senin (26/8) saat ini

**ARAN**  
**N LAHAN**

kondisi cuaca di Riau itu memengaruhi masa transisi dari musim panas ke musim hujan. "Sekarang masih musim panas dan transisi menuju musim penghujan, jadi pertumbuhan titik panas masih terjadi," kata Warih.

Pertumbuhan titik panas itu sebagai contohnya pada Sabtu (24/8) lalu termoniti-

tor oleh satelit sebanyak 73 titik di Riau, dan Ahad (25/8) turun menjadi 27 titik. "Namun untuk Senin 26 Agustus belum dapat dilaporkan, karena masih dalam proses, bisa naik jumlahnya atau bisa turun jumlahnya," jelas Warli.

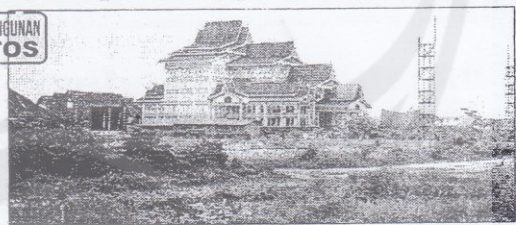
Untuk pertumbuhan titik panas ini biasanya didukung oleh temperatur. Namun dikatakan Warli

Baca Riau Halaman 32

## Dikenai Pajak, Pemprov Mengadu ke Kemendagri

**PEKANBARU (RP)** - Hampir setahun rencana pembangunan **Riau Town Square and Convention Center** atau Ritos terkendala. Salah satu penyebabnya karena belum dukungnya masalah retribusi untuk pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) kawasan bisnis tersebut.

Tidak tuntasnya permasalahan tersebut membuat Pemerintah Provinsi Riau mengadu ke Pemerintah



**TANAH KOSONG:** Lokasi pembangunan Riau Town Square di bekas Purna MTQ. Pekanbaru masih berupa tanah kosong. Senin (26/8/2013). Hingga kini belum ada aktivitas pembangunan karena terkendala masalah izin mendirikan bangunan (IMB).

**BAHAN PELAPIS JOK MOBIL KUALITAS TERBAIK  
DENGAN STANDAR INTERNASIONAL**

**MBtech**  
RESEPTOR ENTERTAINMENT

**HINDARI MOBIL TANPA MBtech**

VISIT OUR WEBSITE  
[www.mbtech.info](http://www.mbtech.info)

**021-459 42680**

08-55-55-55 08-55-55 08-55-55

**EKA HOSPITAL**  
*care you need*

**PROMO  
 MERDEKA**

**diskon 17%**

- Rawat Inap, Rawat Jalan & IGD dari total tagihan (kecuali obat & alat kesehatan)
- Paket General Medical Check Up (Basic, Silver, Gold, Platinum & Eka Star)

Periode 1 s.d. 31 Agustus 2013.  
 Promo tidak dapat digabungkan dengan bentuk promo lainnya.

**informasi : (0761) 698 99 99**

2013-08-01  
 08.00am-04.00pm  
 0761-6989999  
 0761-6989999

# MEDICAL CHECK UP LEBARAN

**Medical Check Up Lebaran**  
Rp 750.000,-

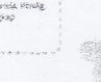
<p><b>Keuntungan Anda :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeriksaan Fisik</li> <li>2. Pemeriksaan EKG</li> <li>3. Rontgen</li> <li>4. Foto Thoraks</li> <li>5. USG Abdomen</li> </ul>	<p><b>Keuntungan Anda :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Garansi Lempang / Tenggapan Garasi = 10 tahun, Uraian, Anestesi</li> <li>2. Asam urat, SGPT, SGOT, Kolesterol, HbA1c, Triptomide, Vitag</li> <li>3. Babi Hbs, Gula Darah Puasa dan 2 jam PP, Urea Lempang</li> <li>4. Gula, Hg</li> <li>5. Kardiologi, Hg, Pengukuran</li> </ul>
---	--

**Medical Check Up Lebaran for Kids**  
Rp 250.000,-

<p><b>Keuntungan Anda :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter Spesial Anak, Gigi, Dokter Anak</li> <li>2. Dokter Dokter Anak, Uraian, Pengukuran</li> <li>3. Pemeriksaan, Uraian Test, Test Gula, Widal</li> <li>4. Dokter Gigi</li> </ul>	<p><b>Keuntungan Anda :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Foto Thoraks</li> <li>2. Uraian, Pengukuran</li> <li>3. Garasi Lempang / Tenggapan Lempang</li> <li>4. Kardiologi, Hg, Pengukuran</li> </ul>
---	--

**Periode s.d. 30 November 2013**  
Berlaku untuk Pasien Umum,  
Asuransi dan Pasien Rawat Inap

**Medical Check Up : (0761) 699 99 55**




**THE SAMEDAY SERVICE**  **2012** **CHAMPION ON COURIER SERVICE | Pekanbaru Service Excellent Award (PkSEA) 2012** **TERKIRIM DIHARI YANG SAMA**  
**Kami adalah sebuah kecepatan dan ketepatan untuk Anda..**  
 **TIKI**  **@TIKI\_RIAU**  **utikiriau@gmail.com**  **SMS: 0619 5955 5656**  **2183A4A7** **SELALU TELPON KAMI: (0761) 56 56 56**  
**Utama Pekanbaru : Jl. Rambutan II No. 17 Telp. (0761) 565656, Fax. (0761) 561620 | Kantor Utama Pekanbaru : Jl. Teuku Umar No. 29 | KCP Rumbai : Jl. Sembilang No. 135**



# Tim Pengembangan Kurikulum Tak Jalan

Laporan EKA GUSMADI PUTRA,  
Pekanbaru  
ekagusmadi@riaupos.co

MESKIPUN pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sudah menetapkan perubahan kurikulum dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) kepada Kurikulum 2013, namun penerapannya belum sepenuhnya di seluruh sekolah negeri terlebih swasta. Bahkan, untuk KTSP sendiri sejak digulirkan pada 2007 silam, di



Memang ada kabupaten yang belum membentuk tim pengembangan kurikulum, apalagi sekolah. Jadi memang belum sepenuhnya bisa maksimal.

■ HADI HARJAJA  
Pj Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau

Provinsi Riau sendiri Tim Pengembangan Kurikulum sebagai pengelola program kurikulum ini masih ada yang belum terbentuk. Tak tanggung-tanggung di lima kabupaten/

kota di Riau disinyalir belum memiliki tim ini. "Memang ada kabupaten yang belum membentuk tim pengembangan kurikulum, apalagi sekolah. Jadi

memang belum sepenuhnya bisa maksimal," kata Pj Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau Hadi Harjaja menjawab Riau Pos. Senin (26/8) usai membuka workshop implementasi KTSP bagi guru SMP se-Riau 2013 angkatan I dan II untuk mata pelajaran biologi, fisika, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan PKN di salah satu hotel di Pekanbaru.

Dijelaskan Hadi, kuatnya tim pengembangan kabupaten tergantung provinsi. Walaupun ada beberapa sekolah bisa membentuk sendiri

tanpa harus menunggu tim kabupaten/kota. Karena bertugas dalam menganalisis program-program kegiatan di tim dalam pengembangan kurikulum, apa kegiatan dan apa yang menjadi keperluan haruslah bermanfaat outputnya bagi pendidikan.

Saat ini Disdik Provinsi Riau sedang melakukan penguatan tim pengembangan kurikulum di tingkat provinsi. "Karena kabupaten harus mengikutinya provinsi. Kalau Provinsi masih lemah memang akan susah diikuti daerah," tuturnya.

Karenanya tim pengembangan kurikulum ini harus terbentuk di sekolah karena kalau belum terbentuk, siapa yang akan mengelola KTSP. Sebab, lanjutnya menekankan satuan kerja sesuai karakteristik sekolah itu yang harus dilakukan, seperti menyusun silabus sampai pada memberikan penilaian.

"Melalui kompetensi inilah diharapkan dari workshop ini bisa tercapai apa yang diinginkan tersebut," kata ketua tim pengembangan kurikulum Provinsi Riau ini menutup pembicaraan (yls)

## PEKANBARU

### Jaksa Bersikukuh Kasus Zulfakri Penyuaan

PEKANBARU (RP) — Kasus yang menimpa mantan Kepala Satuan Reserse (Kasat Res) Narkoba Polres Rohul AKP Zulfakri dinilai sudah tepat ditangani Pengadilan Tipikor. Karena, apa yang dilakukan Zulfakri kuat dugaan merupakan suap dan Zulfakri merupakan aparat pemerintah.

Hal ini disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pasirpangaran Iskandar Zulkarnain SH dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap Rp200 juta tersebut di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Senin (26/8). "Posisi terdakwa sebagai pegawai negeri yang mempunyai jabatan saat kasus tersebut terjadi," ujar JPU.

Dikatakannya, dengan jabatan tersebut Zulfakri diduga menerima uang Rp200 juta dari seorang tersangka narkoba, Andesa. "Itu adalah janji atau hadiah untuk bisa membekas Andesa dari kasus tersebut," lanjutnya.

Karena itulah, Iskandar mengatakan perkara Zulfakri ini bukan termasuk pemerasan. "Karenya meminta majelis hakim untuk menyatakan Pengadilan Tipikor berwenang mengadili perkara ini dan menyatakan perkara ini dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi," ucapnya.

Pada sidang sebelumnya, terdakwa suap Rp200 juta yang juga mantan Kepala Satuan Reserse (Satres) Narkoba Polres Rokan Hulu (Rohul) AKP Zulfakri dinilai bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tipikor untuk menyidangkan kasusnya. Penasehat hukumnya, Asep Rukhyat SH menilai uang yang diterima itu bukan suap, melainkan kasus pidana umum pasal 368 KUHP (pemerasan).

Dalam kasus ini, Zulfakri dijerat pasal 12 huruf b, pasal 5 ayat 2 juncto pasal 5 ayat 1 huruf a dan pasal 11 Undang-Undang nomor 31/1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman kurungan maksimal 20 tahun penjara. (als)

### Sanggar Bujang Dara Pemenang Festival Teater Remaja

PEKANBARU (RP) — Sanggar Bujang Dara SMAN 1 Tembilahan tampil sebagai penjurang terbaik saat dalam helat Festival Teater Remaja 2013 tajaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Riau UPT Taman Budaya yang berlangsung 23-24 Agustus di Anjung Seni Idrus Tintin. Adapun posisi penjurang terbaik kedua diperoleh Teater Hujan SMK Labor Pekanbaru. Sedangkan Teater Sanjaya Kampar sebagai penjurang terbaik ketiga.

Dalam helat tersebut juga diumumkan kategori sutradara terbaik yang dipercayakan Badru Chaerudin (Sanggar Bujang Dara SMAN 1 Tembilahan), sutradara terbaik 2 Intan Yunita Sari (Teater Sanjaya Kampar), dan Sri Subekti Wiyun (Teater Hujan SMK Labor) sebagai sutradara terbaik.

Sementara itu aktor terbaik 1 jatuh kepada Agus Ariya Santa dalam peran Pak Tua (Sanggar Bujang Dara), aktor terbaik 2 Muriata Hanum pemeranan Nursiah (Teater Hujan), dan aktor terbaik 3 Claudia Aprilia berperan sebagai Dang Sri Intan (SMA 9 Pekanbaru). Untuk kategori naskah terbaik jatuh kepada sanggar dari Dumai, meski terbaik dari SMAN 9 Pekanbaru dan penata artistik terbaik jatuh kepada Sanggar Bujang Dara.

Mevakili Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Riau, Yoserial Zein selaku Kepala Museum, mengajak para generasi muda yang tinggal di Riau, terutama yang ikut berkecimpung untuk meningkatkan dan mengutamakan semangat ke-Riau-an. Dijelaskan Yoserial, sejalan dengan apa yang itu dan terkait dengan kreativitas yang mesti diperkenalkan ke depan hendaknya sesuai dengan semangat visi Riau di mana berkecimpung menjadi pusat kebudayaan Melayu di Bontol sebagai Asia Tenggara pada 2020. "Seluruh elemen yang tinggal di Riau harus merasa memiliki Riau dan ikut membangun Riau. Semangat ke-Riau-an harus dibangkitkan," ujar Yoserial Zein saat menutup acara Festival Teater Remaja se-Riau di Anjung Seni Idrus Tintin (24/8). (6/dac)

### 12 September, Kloter

Sambungan dari hal. 21

"Untuk Riau JCH nya berangkat dari kloter empat sampai 14. Pembagian kloter sudah ditentukan oleh panitia haji dari embarkasi Batam. Untuk kloter 14 kita bergabung dengan JCH dari Kalimantan Barat," ungkap Defizion.

Saat ditanyai mengenai persiapan penyelenggaraan haji, dia mengatakan prosesnya terus berlangsung. Dalam hal ini, penyelenggaraan disesuaikan dengan pembagian tugas, baik di tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten/kota.

Untuk administrasi keberangkatan, paspor dan visa menjadi tanggung jawab Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau. Sementara untuk untuk meningsit, biaya domestik dan persiapan lainnya menjadi kewenangan Kanwil Kementerian Agama kabupaten/kota se-Riau dengan berkoordinasi bersama pihak-pihak terkait.

Disinggung mengenai persiapan paspor haji, dia mengatakan untuk paspor haji sudah rampung. Saat ini, sedang dijah untuk persiapan pengurusan visa keberangkatan JCH.

"Yang sudah kita terima ada 2.000 visa JCH. Sisanya sedang dijemput, kabarnya sudah selesai satu bagian. Artinya sudah hampir 4.000 visa JCH yang rampung. Sisanya sedang diproses," urai Defizion (rio)

## Sekda Pastikan Belum Ada Rencana Mutasi

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Riau belum berencana melakukan mutasi dan promosi pejabat dalam waktu dekat ini. Informasi ini menjadi jawaban akan isu mutasi yang mulai berkembang di lingkungan Pemprov Riau.

"Belum, belum ada rencana mutasi. Roda pemerintahan masih berjalan normal dan lancar. Jadi, tidak ada rencana mutasi," tegas Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau Zaini Ismail menjawab Riau

Pos, Senin (26/8) di Kantor Gubernur Riau. Menurut Zaini, proses mutasi belum begitu mendesak untuk dilakukan. Dia menilai, salah satu pertimbangan belum akan dilakukannya mutasi adalah pelaksanaan Pemilihan Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau yang semakin dekat. Pengesahan pejabat di lingkungan dapat menimbulkan informasi yang tidak tepat di kalangan masyarakat dan pihak-pihak terkait.

Pertimbangan lain adalah

masa kepengimpinan Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau akan berakhir dalam waktu dekat ini. Dengan pertimbangan itu, Zaini menilai, proses mutasi dan promosi jabatan belum dilaksanakan.

Saat ditanyai mengenai kesekelompok jabatan Kepala Badan Kepegawaian Daerah, dia mengatakan hal tersebut sudah ada pelimpahan wewenang. Sehingga, tidak ada jabatan yang kosong dan proses



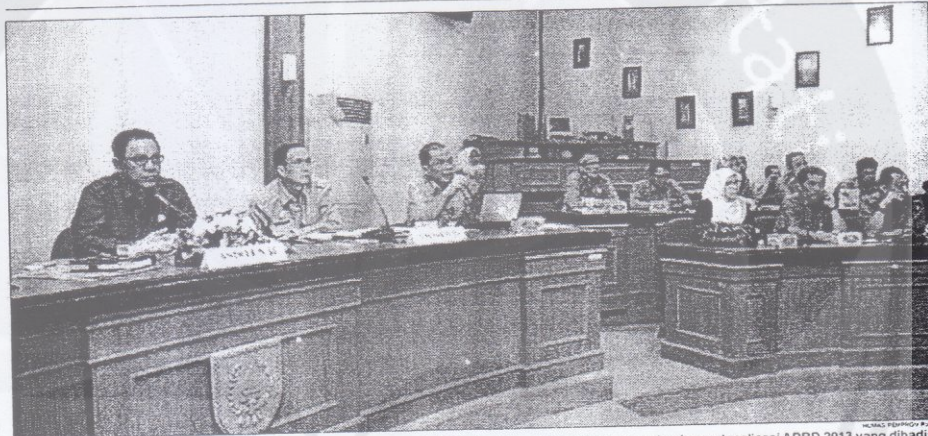
ZAINI ISMAIL

es pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tetap berjalan sesuai mekanisme pemerintahan.

Disinggung mengenai adanya

pembahasan di Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjab) untuk proses mutasi, Zaini menanggapi dengan senyum. Dia menilai, proses pembahasan tersebut tentu sudah dilakukan. Namun, untuk implementasinya dinilai belum tepat.

"Yang pasti dalam waktu dekat ini belum ada mutasi. Kita sedang menyambut pesta demokrasi. Untuk pergeseran jabatan, tunggu saja tanggal mainnya," katanya (adv/b)



EVALUASI APBD: Asisten II Seldaprov Riau Emrizal Pakis didampingi Asisten III Hardy Jamaluddin memimpin rapat realisasi APBD 2013 yang dihadiri seluruh satuan kerja di lingkungan Pemprov Riau, pekan lalu.

## KUA-PPAS Tunggu Pembahasan Banggar

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Riau sudah menyerahkan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPPAS) Perubahan 2013 kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Riau. Kini

prosesnya sedang menunggu pembahasan. Demikian dikemukakan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Zaini Ismail, Senin (26/8) di Kantor Gubernur Riau. Menurut Zaini, draf KUA-PPAS untuk APBD-P 2013

sudah tuntas dan sudah diserahkan ke pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dengan demikian diharapkan pembahasan dapat segera rampung dalam waktu dekat.

"Mudah-mudahan di peng-

ujung bulan ini pembahasan sudah dapat dituntaskan,

karena sudah diserahkan," ungkapnya. Disinggung mengenai berapa total anggaran yang diusulkan pada APBD-Perubahan, Zaini mengaku belum bisa memastikan berapa angkanya. Demikian pula tentang total

keseluruhan program yang akan dipaparkan adanya pengalihan anggaran dalam usulan tersebut.

"Kita berharap semuanya dapat diges secepatnya proses pembahasan segera tuntas," harapnya (adv/a)

### Riau Belum Bebas Hot Spot

Sambungan dari hal. 21

temperatur masih normal, berkisar 33 derajat celsius. "Temperatur masih normal dan belum ekstrem," katanya.

Sampai hari ini disampaikan Danlanud Roemlin Nurjalin, Kol Pnb Andawana sebagai Satgas udara untuk karhutla, melalui Kapentak Mayor SS Filipudri SSos mengatakan AU masih melakukan water bombing di titik-titik kebakaran. "Masih, kita masih melakukan water bombing ke titik-titik kebakaran, sehari bisa naik satu helikopter atau bahkan dua," jelas Filipudri.

Sementara itu, akibat masih

terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berdampak pada kondisi udara di Pekanbaru, pagi hari jarak pandang menjadi terbatas. Untuk Senin (26/8) jarak pandang di Pekanbaru minimum 1.000 meter, langit tertutup kabut asap.

"Penerbangan normal hanya saja tadi pukul 7.00 WIB terjadi kabut asap dengan jarak pandang 1.000 meter, hanya baru langsung sekitar 1,5 jam jarak pandang sudah di atas 3.000 meter karena asap sudah berlalu," ujar airport duty manager Bandara SKK II Ibnu Hasan.

Selain itu disampainya juga bahwa untuk jumlah tidak

berpengaruh dengan kondisi cuaca saat ini. "Sesudah liburan tepatnya H+9 dan 10 penumpang mencapai 11.500 orang dibandingkan sebelum hari raya Idul Fitri hanya 10.000 orang penumpang banyak," kata Ibnu mengkhiri.

BPBD Imbau Daerah

Antisipasi Karhutla Terkait dengan hotspot yang kembali menyelimuti Riau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau mengimbau kabupaten/kota untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ini menjadi perhatian, karena intensitas asap di

Riau kembali meningkat.

"Ya memang saat ini intensitas kabut asap mulai meningkat. Untuk itu, kami minta seluruh kabupaten/kota untuk dapat siaga. Begitu juga pihak-pihak terkait yang berkompeten di bidangnya," ujar Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kaifi Azmi saat dihubungi melalui telepon seluler.

Mengenai langkah antisipasi yang dapat dilakukan, dia mengatakan salah satu langkah konkret adalah mengoptimalkan pengawasan. Jika perlu BPBD di kabupaten/kota turun ke titik-titik yang tergolong rawan karhutla.

"Kita tentunya siap sedia untuk

dan mencari solusi bersama.

Hanya saja, yang telah dahulu mengetahui itu adalah kabupaten/kota. Karena mereka yang memiliki wilayah," terangnya.

Langkah antisipasi awal yang juga dapat dilakukan dengan berkoordinasi bersama perusahaan dan mengoptimalkan masyarakat peduli api (MPA).

Saat ditanyai mengenai jumlah hot spot yang terpantau, dia mengaku belum mengetahui angka pasti. Pasalnya, BPBD Riau belum mendapat laporan dari EMKG.

"Biasanya laporan disampaikan melalui hari atau kesekelompok harinya. Kita tentu akan mengupdate informasi tersebut. Nanti akan kita kros cek langsung," ungkapnya (yls)

### Pengadaan Tower Inhu

Sambungan dari hal. 21

hakim yang dipimpin Masrizal SH, proyek ini awalnya dianggarkan pada 2011. Penganggaran pertama Rp706 juta, tidak hanya untuk pengadaan tower, namun juga perangkat lain seperti komputer, stabilizer dan dan printer. "Anggaran kedua mencapai Rp706 juta yang dimasukkan pada APBD-P Inhu pada tahun yang sama," ujar saksi.

Dikatakan saksi lagi, ia hanya membangun tower. Setelah proyek selesai dan serah terima pekerjaan ditandatangani, belakangan baru diketahui bahwa yang ditandatangani saksi kem-

suk juga memuat pengadaan perangkat komputer. Saya tidak tahu, dalam kontrak hanya mengerjakan tower. Kalau ada di dalamnya pengadaan komputer, saya tidak tahu. Mungkin saya khilaf," kata saksi lagi.

Dalam pengujian proyek ini, diakui pada oleh saksi bahwa ada pengurangan spesifikasi yakni besi dan tinggi tower, dari yang seharusnya mencapai 75 meter dan menggunakan besi 40 cm x 40 cm. "Karena beberapa hal, tinggi tower dan ukuran besi dikurangi," kata saksi. Saksi mengaku tidak mau menandatangani kontrak tersebut akhirnya berujung mangkal (adi)





## Data Dirian Jenjang Karir

Lahir: Kediri, Jawa Timur, 8 Juli 1957  
Usia: 56 tahun

2013: Panglima TNI  
2013: KSAD  
2013: Wakil Gubernur  
2010: Lemhannas  
2010: Pangdam IISilwangi  
2010: Pangdam XIV/Tanjungpura 2010

MOELDOKO

## Moeldoko Panglima TNI

JAKARTA (RP) - Penunjukan Jenderal TNI Moeldoko sebagai panglima TNI berjalan begitu mulus. Setelah lolos uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I, kemarin rapat paripurna DPR menyetujui pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) tersebut untuk menggantikan Laksamana Agus Suhartono.

Pria yang lahir di Kediri, 8 Juli 1957, itu juga tidak perlu menunggu lama untuk dilantik. "Pelantikan panglima TNI pada 30 Agustus ini," ujar Juru Bicara Presiden Julian Adrin Pasha, Selasa (27/8).

Wajah Moeldoko kemarin begitu semringah. Setelah rapat paripurna, dia memberi hormat secara khusus kepada para wakil rakyat. Menurut Moeldoko, setelah dilantik, agenda pertama yang akan dijalankan adalah melakukan konsolidasi internal.

Baca Moeldoko Halaman 11

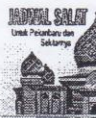
## SUDUT PANDANG



INGAT: ATASAN YANG BAIK ADALAH ATASAN YANG PERNAH MENJADI BAWAHAN YANG BAIK.

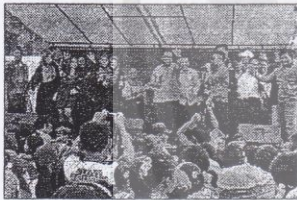
Dikutip dari Buku Manufacturing Hope: Besar

DAHLAN ISKAN



SUBUH	ZUHUR	ASAR	MAGHRIB	SYUR
04.38	12.17	15.22	18.23	19.38

Rangai 6 mnt. Sempang +2 mnt. Tambahan 1 mnt. Pasang-pasangan + mnt. Sempang 3 mnt. Sempang 5 mnt. Pasang-pasangan + mnt. Sempang 3 mnt. Sempang +2 mnt. Sempang 2 mnt.



ORASI: Kagubri HM Lukman Edy memberikan orasi di depan massa pendukungnya saat kampanye di Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Selasa (27/8/2013).

## Majukan Riau, LE Tawarkan Empat Pilar

UJUNG TANJUNG (RP) - Hiburan dari panggung rakyat masih mengalunkan lagu dangdut, saat calon Gubernur Riau HM Lukman Edy menjejalkan kakinya pada lokasi acara kampanye dialogis di sebuah kediaman pinggir Jalan Lintas Balam, Bangko Pusako, Selasa (27/8).

Jarum jam saat itu menunjukkan pukul 15.30 WIB. Begitu keluar dari mobil, LE, panggilan poplernya, langsung disambut dan bersalaman dengan jajaran

Baca Majukan Halaman 2

## Napi Mengamuk, Seorang Polisi Terluka

PEKANBARU (RP) - Lembaga Permissyarakatan (Lapas) Kelas II A Pekanbaru geger, Selasa (27/8) sore sekitar pukul 16.20 WIB. Pasalnya, Syamsul (40), seorang narapidana (napi) kasus pembunuhan mencoba kabur dan mengamuk membabi-buta menggunakan parang saat akan diamankan. Akibatnya, seorang anggota polisi mengalami luka di bagian tangan akibat sabitan parang dan harus dilarikan ke rumah sakit.

Baca Napi Halaman 11

## Atan Sengat



Asap Lagi... Asap Lagi

Bile lagi nak tegas dan serius atasi jeribu n?

# Asap Lagi... Asap Lagi...

Laporan TIM RIAU POS, Pekanbaru redaksi@riapos.co

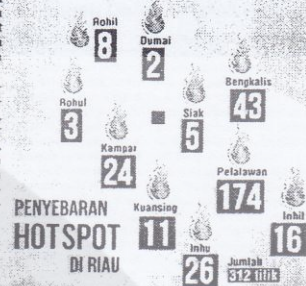
PROVINSI Riau dilanda kabut asap lagi. Kabut asap tebal akibat pembakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang sempat hilang pertengahan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri lalu, kembali menyelimuti sejumlah daerah beberapa hari terakhir.

Hasil monitoring satelit NOAA pada Selasa (27/8) pukul 16.00 WIB yang dirilis Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pekanbaru, ditemukan

312 titik panas/api (hot spot) di 10 kabupaten/kota yang diduga penyebab timbulnya kabut asap. Hanya Pekanbaru dan Kepulauan Meranti yang tanpa hot spot.

Kabupaten Pelalawan terpantau paling banyak yaitu 174 titik. Disusul Bengkalis 43 titik, Indragiri Hulu 26 titik, Kampar 24 titik, Indragiri Hilir 16 titik, Kuantan Singingi 11 titik, Rokan Hilir 8 titik, Siak 5 titik, Rokan Hulu 3 dan Dumai 2 titik. Sementara untuk Sumatera terpantau 343 titik.

Baca Asap Halaman 8



## 5 Penerbangan Delay, Sekolah Pulangkan Siswa

PEKANBARU (RP) - Terbatasnya jarak pandang akibat kabut asap, mengakibatkan lima penerbangan di Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru mengalami keterlambatan (delay) terbang. Selasa (27/8) pukul 07.00 WIB. Selain itu, dua penerbangan dari Jakarta dialihkan ke bandara terdekat.

Data yang diperoleh Riau Pos dari OIC Bandara SSK II, ada 5 penerbangan delay menuju Jakarta, Medan dan Batam. Sementara dua pesawat Lion Air dan Garuda Indonesia dari Jakarta sempat holding (berputar-putar) di udara hingga akhirnya kedua pilot masing-masing memutuskan memutar kembali pendaratan (divert) ke Batam dan Medan.

Perubahan jarak pandang cepat sekali. Pagi sekitar pukul 06.00 WIB berada di jarak 700 meter dan dipukul 07.00 WIB berubah jadi 300 meter. Di SSK II

Baca 5 Penerbangan Halaman 8

JUAL MASKER: Seorang warga mencari rezeki di tengah kabut asap dengan menjual masker di Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru. Foto bawah, jarak pandang terbatas akibat kabut asap sehingga mengganggu penerbangan di Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II, Selasa (27/8/2013).



MANASIK HAJI: Jamaah Calon Haji (JCH) melaksanakan manasik haji di Masjid Agung An-Nur harus menggunakan masker akibat tebalnya kabut asap yang menyelimuti Kota Pekanbaru, Selasa (27/8/2013).

Baca JCH Halaman 11

The Legend Meets Urban Soul

PT. PEKAN PERKASA BERLAN MOTOR

Address: Jalan Sudirman No. 330 Pekanbaru 28111  
Phone: (0771) 2484131  
Fax: (0771) 2484131



## Rusia Ancam Penyerang Suriah

MOSKOW (RP)—Rencana intervensi militer Barat di Suriah menuai kecamaran dari Rusia dan Cina. Moskow memper-

ingatkan, setiap langkah militer akan berdampak sangat besar terhadap stabilitas keamanan regional.

Saat ini, Amerika Serikat dan sekutunya memang tengah mempersiapkan untuk menyerang Suriah. Itu terjadi lantaran sejumlah tentara loyalis Presiden Bashar al-Assad diduga menggunakan senjata kimia saat menyerang para pemberontak. Meski PBB turun tangan untuk menginspeksi dugaan itu, Menlu AS John Kerry sudah men-

takan bahwa serangan senjata kimia tersebut terbukti besar. Seorang juru bicara kantor Perdana Menteri Inggris menyatakan, pihak militer tengah merencanakan strategi darurat untuk sebuah aksi militer di Suriah. PM David Cameron dilaporkan mempersiapkan libanannya dan kembali ke London terkait dengan perkembangan krisis di Suriah.

Namun, Juhir Kementerian Luar Negeri Rusia Alexander Lukashevich

menyatakan kepada komunitas internasional agar berhati-hati dalam mengambil sikap terkait dengan krisis Suriah. Panduannya, kata dia, harus menggunakan hukum internasional. "Upaya pemertan-jagan Dewan Keamanan dan sekali lagi mencari-cari alasan tanpa dasar untuk mengintervensi militer akan memperburuk kondisi Suriah. Itu akan berdampak kerusakan parah di Timur Tengah serta Afrika Utara," jelasnya.

Senin (26/8) malam Sabtu setempat, AS memutuskan untuk pertemuan mediasi dengan Rusia untuk penyelesaian krisis Suriah. Alasannya, terkait dengan dugaan masalah penggunaan senjata kimia. Beberapa jam kemudian, Moskow kecewa atas keputusan Washington. Rencananya, dua pihak tersebut bertemu di Den Haag hari ini, Rabu (28/8), dengan agenda merancang konferensi internasional untuk menemukan solusi politik atas krisis Suriah.

Kantor berita Cina, Xinhua menekankan bahwa Barat terlalu cepat menyimpulkan bahwa tentara Suriah yang menggunakan senjata kimia. Padahal, tim PBB belum menyelesaikan inspeksi. Kemudian pun belum didapat. Pemerintahan Suriah maupun pemerintah asing menyalahkan soal serangan gas beracun di pinggirin Damaskus pada Rabu pekan lalu. (cak/cis/dos/jpm/fia)

## Asap Lagi... Asap Lagi...

### Sambungan dari hal. 1

Angka ini lebih tinggi dari pantauan pagi hari pukul 05.00 WIB, yakni sebanyak 297 titik. Saat itu Pelawan terpantau 151 titik, Indragiri Hulu 54 titik, Indragiri Hilir 29 titik, Bengkalis 23 titik, Kampar 20 titik, Kuantan Singingi 10 titik, Siak 6 titik, Rokan Hilir 2 titik dan Rokan Hulu 2 titik. Dumai, Meranti dan Pekanbaru nol. Sementara itu jumlah titik Sumatera terpantau 407 titik.

"Kabut asap yang terjadi ini murni dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di beberapa daerah di Provinsi Riau," jelas Staf Analisa BMKG Pekanbaru, Slamet. Untuk jarak pandang pantauan jam per jam, disampaikan Slamet, pada pukul 05.00 WIB itu 2.000 meter. Satu jam kemudian turun menjadi 800 meter dan pukul 07.00 WIB jadi 500 meter. Jarak pandang terbatas justru terjadi pukul 08.00 WIB yaitu 400 meter, pukul 09.00 WIB naik jadi 700 meter dan hingga pukul 12.00 WIB terus naik dan mencapai 1.000 meter. Dijelaskan Slamet lagi, pertumbuhan titik panas juga didukung musim kering saat ini dan pola angin. Di samping adanya dugaan ada campur tangan manusia. "Ada juga pengaruh badai tropis Kongrei di laut Cina Selatan, sehingga semua massa udara ditarik ke lokasi badai, membuat cuaca jadi panas dan memudahkan tersulutnya hot spot," jelasnya.

Ketua Kelompok Analisa BMKG, Warli Budi Lestari menambahkan, saat ini BMKG melakukan dua kali monitoring titik panas. "Pagi pukul 05.00 WIB dan petang pukul 16.00 atau 17.00 WIB, jumlahnya meningkat dari pantauan pagi," ujar Warli.

Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Sutopo menyatakan, untuk Sumatera, rekor hot spot terbanyak

dipegang Riau, disusul Jambi, Sumatera Selatan dan Sumatera Barat. Kondisi ini dipicu musim kemarau dan jumlah ini diprediksi akan terus meningkat karena diprediksi puncak aktifitas pembakaran hutan dan lahan terjadi Oktober. "Oktober adalah puncak dari kebakaran hutan dan lahan di Sumatera, 99 persen akibat dibakar, baik oleh individu maupun kelompok," kata Sutopo kepada Riau Pos di Jakarta, kemarin.

Sutopo menegaskan, penegakan hukum adalah kunci pengendalian pembakaran lahan dan hutan. Penda, PPNS Kementerian Kehutanan, PPNS Kementerian Pertanian, PPNS KLH dan Kepolisian hendaknya makin meningkatkan pengendalian pembakaran lahan dan hutan tersebut. Jika tidak maka jumlah hot spot makin meningkat.

Dua Helikopter Diturunkan Untuk mengatasi ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau menurunkan dua helikopter. Informasi itu disampaikan Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau Kufi Azmi kepada Riau Pos, Selasa (27/8). Menurut Kufi, helikopter tersebut sudah turun ke beberapa daerah untuk melakukan bombing uat.

"Kita sudah turunkan dua helikopter. Satu helikopter ke daerah Pelawan untuk melakukan bombing uat. Sedangkan satu pesawat lagi melakukan pemantauan di titik-titik rawan Karhutla," ungkapnya.

Mantan Kepala Bapen Pencerangan Biro Humas Setdaprov Riau itu juga mengatakan selain dua helikopter tersebut, juga terdapat dua helikopter tambahan. Satu helikopter stand by dan satu helikopter lagi dalam kondisi perbaikan.

Saat ditanyakan mengenai langkah pencegahan lain, ia mengatakan saat ini proses persiapan hujan buatan sudah

mulai digalakan. Hanya saja pesawat yang akan melakukan hujan buatan masih berada di Palembang.

Menurutnya, proses pemadaman kebakaran hutan dan lahan diprediksi akan berkurang dalam beberapa hari ke depan. Pasalnya, intensitas hujan akan terus turun diprediksi di awal yang terbakar. "Setiap harinya pemadaman dari udara dilakukan sampai 50 kali. Helikopter yang disediakan memang diperuntukkan melakukan titik-titik api di Riau," ungkap Kufi yang mengaku terus melakukan koordinasi dengan BMKG dan pemerintah kabupaten/kota se Riau.

Ia menambahkan, proses pemadaman dan antisipasi Karhutla tidak hanya dilakukan saat terjadi karhutla. Pasai, helikopter yang tersedia stand by akan terus pantau. Diprediksi bulan Oktober mendatang sudah memasuki musim hujan," ujarnya Kufi.

Sementara itu, sehari sebelumnya, Menteri Kehutanan RI Dr H Zulkilili Hasan meminta aparat kepolisian untuk dapat membantu dengan tugas patroli aksi pembakaran lahan dan hutan di Pelawan. Jika tindakan itu tidak dilakukan, kasus Karhutla akan terus terjadi.

"Berdasarkan data yang telah kita sampaikan di Provinsi Riau telah ditemukan sebanyak 24 kasus pembakaran lahan dan hutan yang diduga dilakukan dengan sengaja. Namun demikian, saat ini kita masih menunggu hasil pemeriksaan dari pihak kepolisian. Jadi, kita minta pihak kepolisian dapat memproses dan menindak tegas pelaku Karhutla ini dengan hukuman setimpal sesuai dengan pasal 187 KUHP yaitu tentang pembakaran kemudian juga pasal 170, yaitu ada ancaman hukuman penjara 120 tahun atau hukuman mati," ujar Zulkilili Hasan saat melakukan kunjungan kerja di PT RAPP, Senin (26/8) lalu.

Di tempat terpisah, Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pelawan Ir H Mulyono MBA, Selasa (26/8) mengatakan akibat kabut asap jarak pandang terbatas terutama pagi hari. "Ya, meski sempat tiga hari lalu Kabupaten Pelawan nihil hot spot akibat diguyur hujan deras, namun berdasarkan data dari satelit NOAA-18 bahwa pada 26 Agustus kembali muncul," papir Mulyono.

27 Tersangka Terkait kasus maraknya pembakaran lahan yang mengakibatkan kabut asap beberapa waktu lalu, Polda Riau telah menetapkan 27 orang tersangka. Selain perangnya, satu perusahaan juga jadi tersangka. Untuk mendalami dugaan pelanggaran yang dilakukan perusahaan, saksi ahli hukum pidana akan ditugaskan. "Ada 27 orang tersangka perangnya dan satu perusahaan. Belum ada tersangka baru," ujar Kabid Humas Polda Riau, AKBP Hermansyah SIK, Selasa (27/8).

Untuk terduga perusahaan pembakar lahan, Hermansyah menambahkan, masih mendalami dengan melakukan pemeriksaan saksi ahli. "Kasusnya sudah berlanjut ke tahap penyidikan. Sejauh ini, terangkanya baru perusahaan. Kalau wangnya belum ada, karena penyidik masih mendalami pemeriksaan dengan mendatangkan saksi ahli dari UGM," ujarnya sambil menyebutkan saksi ahli ditandatangani 28 Agustus ini. Hermansyah menegaskan, pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait kembali muncul hot spot di Riau. Jika ada terdikasi, katanya, polisi akan menuntut.

Menyamping Karhutla, hal yang sama tanggung jawab kepolisian. Ia mengimbau semua unsur di masyarakat saling bahu membahu. (gis/ali/fo/fat/egp/rio/yud/auw/4/csi/fia)

## 5 Penerbangan Delay, Sekolah Pulangkan

### Sambungan dari hal. 1

kemarin, take off penerbangan pertama sekitar pukul 06.35 WIB normal, meski jarak pandang 700 meter," kata Airport Duty Manager PT (persero) Angkasa Pura II Bandara SKK II, Baiquni kepada wartawan. Disebutkannya, yang diartikan ke Batam penerbangan Lion Air JT388 dan Garuda Indonesia GAI70 dialihkan ke Medan. "Kedua dari Jakarta, sempat holding di udara Pekanbaru. Kondisi cukup parah, minimum tadi pagi (kemarin, red) jarak pandangnya 300 meter. Sehingga untuk koordinasi soal kondisi cuaca dengan muspadi dan untuk landing pesawat diserahkan sepenuhnya ke pilot," jelasnya.

Selain itu, kabut asap juga membuat sesak nafas serta pedih di mata. Dari pengamatan Riau Pos pukul 07.30 WIB di Jalan Garuda Sakti, Pekanbaru, kondisi kabut asap begitu pekat. Begitu juga dengan jalan-jalan protokol. Pengendara roda dua sangat merasakan dampaknya. "Asapnya sangat tebal, kalau mobilnya sepeda jadi mata jadi pedih dan begitu terus di hidung," tutur Reji (22), seorang pengendara roda dua yang ditemui Riau Pos saat melewati Jalan Sekeloa-Hatta. Kondisi itu juga terlihat di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska) Riau, Panam, Pekanbaru. Di sebagian besar wilayah Pekanbaru, masih tertutup asap tebal hingga kemarin sore.

Sementara itu beberapa sekolah menengah memperpendek jam sekolah. Di lima pulang lebih awal pada pukul 09.00 WIB. Salah satunya terpantau Riau Pos di MTS Negeri Andalan dan MAN 2 Model Pekanbaru. Saat Riau Pos mendatangi kedua sekolah yang letaknya bersebelahan tersebut pukul 11.00 WIB, kondisinya sudah tidak ada aktifitas belajar-mengajar. "Kamis sudah pulang pukul 9.00 Bang," ujar seorang siswa sambil berlalu pulang kepada Riau Pos. Berdasarkan pantauan Laboratorium Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Pekanbaru, kualitas udara di Kota Bertaub terus turun. Bahkan pukul 16.00 WIB kemarin, kualitas udara masuk kategori tidak sehat.

Kepala Labor Udara BLH Kota Pekanbaru, Syarif, mengatakan, menurutnya kualitas udara yang terjadi di sebagian besar wilayah Pekanbaru akibat pencemaran asap yang berasal dari pembakaran lahan serta pembakaran hutan. Labor udara tak mengetahui penyebabnya secara pasti, menurutnya bisa saja terjadi pembakaran lahan atau hutan yang terjadi di luar Pekanbaru.

"Tergantung dari arah angin, sehingga perubahan kualitas udara dapat berubah dengan cepat. ISPU hari ini (kemarin, red) 170 kritikal parameter PM 10, kategori tidak sehat," tegas Syarif.

Dinas Kesehatan (Diskes) Riau mengimbau langkah antisipasi dengan isolasi masyarakat atau lembaga kemasyarakatan yang ingin membantu masyarakat mendapatkan masker dapat mengambil di Dinas Kesehatan Riau.

"Saya menyarankan memakai masker, baik untuk digunakan sendiri, atau mengimpor di Dinas Kesehatan kabupaten/kota masing-masing," ujar Kepala Diskes Riau, Zainal Arifin usai rapat pengendalian udara di Kantor Gubernur, Selasa (27/8). Stok yang dimiliki kabupaten/kota ditambah stok yang dimiliki provinsi telah berjumlah 170 ribu masker.

Namun meski sudah 2 hari asap menyelimuti Riau, menurut Zainal, pihaknya belum menerima laporan adanya peningkatan penderita ISPA (gis/ali/fo/fat/egp/rio/yud/auw/4/csi/fia)

# Kontribusi HTI, Pulp dan Kertas Bagi Pembangunan Indonesia

Pengusahaan atau pemanfaatan hutan alam produksi sejak 1970 sampai dengan 1990 memberikan devisa terbesar kedua setelah migas, dimana hal ini berperan penting dalam mendukung pertumbuhan industri perikanan nasional, menyerap tenaga kerja terutama negara-negara tidak terampil dan membuka isolasi daerah-daerah pedalaman yang sangat diperlukan dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, perlu kehadiran pemerintah untuk meningkatkan produktivitas kawasan hutan produksi melalui pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI).

Pembangunan HTI ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas hutan produksi, dalam rangka pemenuhan kebutuhan bahan baku industri perikanan dan penyediaan lapangan usaha (pertumbuhan ekonomi), penyediaan lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan dan perbaikan kualitas lingkungan hidup, serta mendorong daya saing produk industri perikanan (penggergajian, kayu lapis, pulp & paper, meubel) untuk kebutuhan dalam negeri dan ekspor. Kebutuhan dunia terhadap industri kehutanan di tahun 2030 sekitar tiga kali lebih banyak dibanding tahun 2013. Pemerintah Indonesia telah menetapkan dari 78 juta hektar (60%) digunakan sebagai hutan produksi dan 53 juta hektar (40%) digunakan untuk area konservasi. Dari 78 juta hektar tersebut yang digunakan untuk industri pulp and paper yakni sekitar 10,8 juta hektar. Kontribusi dari industri kehutanan untuk perkembangan

Indonesia dapat menciptakan lebih dari 20 juta mata pencaharian dan 1,8 juta pekerjaan.

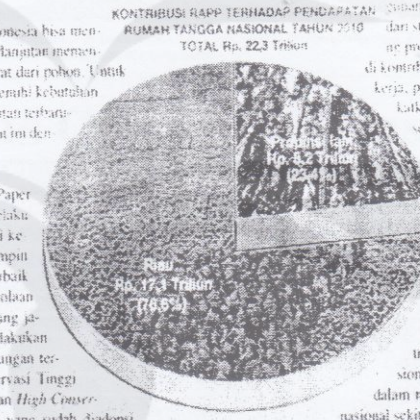
Melalui sektor kehutanan, Indonesia bisa menjadi pemain kunci dalam keberlanjutan memenuhi kebutuhan dunia untuk serat dan pohon. Untuk dapat terus berlanjut dan memenuhi kebutuhan perlu dilakukan penanaman hutan terbarukan atau yang lebih dikenal saat ini dengan HTI.

PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) sebagai salah satu pelaku dunia usaha di bidang industri kehutanan HTI menjadi penunjang dalam menjalankan praktik terbaik (best practice) dalam pengelolaan hutan lestari secara bertanggung jawab, dan dikelola dengan melakukan pendekatan termasuk perlindungan terhadap Hutan Bernilai Konservasi Tinggi atau yang lebih dikenal dengan High Conservation Value Forest (HCVF) yang sudah diadopsi sejak tahun 2006 secara sukarela.

Selanjutnya, di tahun 2010 RAPP menjadi perusahaan pertama di Indonesia yang menerima sertifikasi Manajemen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK PHPL). Investasi sosial, konservasi lingkungan dan memberikan kontribusi besar bagi pembangunan ekonomi merupakan bagian terpadu dari nilai-nilai bisnis dan tindakan yang diterapkan RAPP dalam menjalankan bisnisnya.

Saat ini, 19% dari areal konsesi RAPP di semenanjung Kampar dialokasikan

Salah seorang karyawan sedang melakukan aktivitas pengkajian kebidanan untuk gunduli di areal konservasi

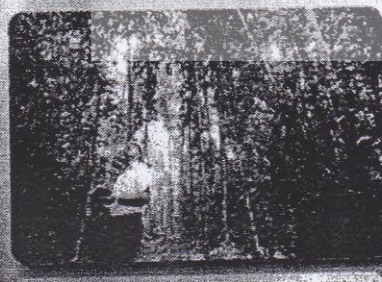


sebagai kawasan lindung. Hutan lestari merupakan peranan penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia sebagai bagian dari strategi nasional dalam upaya melindungi program pemerintah. Hal tersebut menjadi kontribusi penting guna penyediaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan serta peningkatan kesehatan dan pendidikan RAPP, semakin yakin bahwa keberadaannya merupakan bagian dari solusi untuk menjawab tantangan dalam mengembangkan konservasi lingkungan, pembangunan sosial dan ekonomi.

Lebih lanjut lagi hasil penelitian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM-UI) tahun 2010 menyimpulkan selama beroperasi (1999-2010) RAPP telah berkontribusi dalam pembentukan PDB nasional sekitar Rp 75 triliun. Berkontribusi dalam menciptakan pendapatan rumah tangga nasional sekitar Rp 22,3 triliun, dan Riau sekitar Rp 17,1 triliun (76,6%), dan sisanya 23,4% muncul di Provinsi lainnya.

Kontribusi peningkatan jumlah tenaga kerja RAPP dan perusahaan rekannya secara rata-rata sekitar 87 ribu orang, yang terdiri dari 64 ribu orang (72,95%) di Riau, dan 23 ribu orang (27,05%) muncul di provinsi lain. Pengeluaran untuk program CSR telah memberikan dampak multiplier effect, bahkan dalam jangka panjang, alokasi pengeluaran program CSR yang tepat sasaran dapat membantu mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. (\*)

Foto udara pemandangan persawahan di Pangkajene, Kabupaten Pelalawan, berdekatan dengan pabrik PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP). Foto diambil tahun 2013



Aktivitas karyawan yang sedang melakukan pengkajian kebidanan untuk gunduli di areal konservasi sekitar hutan Pelawan, Pangkajene, Riau.





● TATA LETAR, AEC



Sekolah Diliburkan  
Sumbangan dari hal. 1

Kabag Humas Arisman Rorie, "Terhitung besok (hari ini, red), mereka diliburkan sampai waktu yang ditentukan kemudian," ujar Arisman Rorie, malam tadi.

Dalam SE itu juga disebutkan, untuk kelas 4-9 (SD dan SLTP) dan SLTA tetap belajar seperti biasa. Kecuali untuk siswa yang rentan mengalami gangguan kesehatan karena asap diperbolehkan untuk mengambil libur.

"Di poin berikutnya, di surat edaran itu meminta sekolah untuk mengurangi aktivitas kegiatan sekolah yang berada di luar ruangan," imbuh Rorie.

Selain itu, kemarin, ia mengemukakan, Disdik mengambil kebijakan meliburkan tujuh sekolah selama satu hari karena kabut asap sangat tebal di sekolah yang berada di pinggiran kota itu. Kondisi ini mengganggu proses belajar-mengajar dan kesehatan peserta didik.

Kepala Seksi (Kasi) SMP, SMA

Disdik Pekanbaru Majelis mengatakan, instruksi meliburkan sekolah tersebut disampaikan Disdik melalui short message service (SMS). "Sekundum surat edaran itu bakal kita sebarikan di sekolah tersebut," ujar Majelis.

Dikatakan dia, sebelum memberikan kebijakan untuk meliburkan tujuh sekolah itu, Disdik telah mendapatkan informasi dari sekolah bersangkutan. Tak hanya ketebalan asap, namun dampak juga siswa mengganggu proses belajar-mengajar.

"Kita sudah dihubungi pihak sekolah tentang kondisi asap yang mengkhawatirkan itu. Melalui SMS sudah diinstruksikan agar sekolah-sekolah yang ada di pinggiran itu diliburkan satu hari, ungkapnya.

Untuk mengetahui perkembangan terkini kualitas udara, Disdik telah menunjuk Dinas Kesehatan (Diskes). Apabila kondisi udara sudah memungkinkan, lanjutnya, maka sekolah tersebut baru bisa masuk sekolah kembali. "Kualitas udara sangat tidak sehat berdasarkan koordinat kita den-

gan Emission Monitoring System (EMS)," katanya.

Sementara, untuk sekolah-sekolah yang berada di tengah kota, Majelis mengatakan pihak sekolah bisa meliburkan jika udara sudah diperbolehkan.

Adapun tujuh sekolah yang meliburkan peserta didiknya lebih awal kemarin antara lain SMPN 6 Pekanbaru yang menginstruksikan siswa pulang pukul 09.00 WIB, SMPN 5 Pekanbaru pukul 10.00 WIB dan SMPN 7 Pekanbaru pukul 10.00 WIB. Kemudian SMAN 13 Pekanbaru pukul 09.00 WIB, SMAN 5 Pekanbaru pukul 10.00 WIB dan SMPN 19 Pekanbaru.

"Besok siswa kita akan liburkan. Ini sesuai pemberitahuan Dinas Kesehatan kepada Kadisdis, mengenai kualitas udara yang tidak sehat. Sekolahnya, Kadisdis akan menginformasikan akan ada pengumuman belajar-mengajar. Karena kondisi udara yang tidak sehat seperti ini," ungkap Kepala Seksi SMPN 6 Pekanbaru, Zuhairi SPd kepada Riau Pos.

Hal itu juga diaku salah se-

orang siswa SMPN 6 Pekanbaru, Harum (14). "Ya, sudah pulang dari pukul 09.00 tadi. Karena asap jadi libur. Tapi besok (hari ini, red) masuk lagi," ujarnya.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMAN 13 Pekanbaru, Drs T Andan mengatakan, sesuai instruksi dari pimpinan, siswa-siswi dipulangkan. "Jadi sesuai instruksi yang tidak baik, dapat berakhir gangguan kesehatan para siswa," jelasnya.

Begitu juga di SMPN 7 Pekanbaru. Salah seorang siswa, Yolanda menyebutkan, sekolah mengumumkan siswa-siswi pulang lebih awal. "Sudah dari pukul 10.00 pulang. Majelis guru mengumumkan untuk pulang. Tapi besok masuk seperti biasa," ujar Yolanda.

Kepala SMK Negeri 5 Pekanbaru, Feri Dwardi SPd, juga membenarkan sekolah yang dipulangkan lebih awal setelah sekolah lainnya sudah memulangkan siswa.

"Kita baru tahu info itu setelah di hubungi langsung oleh pihak Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, sekitar pukul 10.30 WIB," ter-

dengan tugas yang telah diberikan guru mata pelajaran," tutur Feri.

Sementara, mengikuti pelajaran, pada jam istirahat pertama mahasiswa di Kecamatan Rumbai dan Rumbi Pesisir sudah meminta kepada siswa-siswinya untuk belajar di rumah. Hal senada juga disampaikan Kepala SMK Negeri 7 Pekanbaru, Suratno.

"Benar, setelah mendapat informasi dari Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, begitu jam istirahat pertama kita langsung memulangkan hal tersebut kepada seluruh siswa," terangnya.

Namun, beberapa sekolah di Kecamatan Rumbi dan Rumbi Pesisir mengaku baru mengetahui info tersebut pukul 10.30 WIB. Seperti yang disampaikan, Anir Hamzah kepala SD Negeri 149 Pekanbaru menyebut, kabar murid dipulangkan lebih awal setelah sekolah lainnya sudah memulangkan siswa.

"Kita baru tahu info itu setelah di hubungi langsung oleh pihak Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, sekitar pukul 10.30 WIB," ter-

angnya.

Sementara sekolah di luar itu, meski proses belajar dan mengajar tetap berlangsung, siswa diwajibkan menggunakan masker meski di dalam ruangan kelas. Kondisi ini terlihat di MTs Negeri Andalan Pekanbaru. Ini karena siswa tak nyaman lagi mengikuti proses belajar-mengajar. Tak hanya mata yang perih, para siswa juga merasa dada mereka terasa sesak.

"Perih sekali. Mata belajar pun tak nyaman. Kita pakai masker tapi nafas masih sesak juga," ungkap salah-siswa MTsN Andalan yang ditemui Riau Pos di ruang belajar.

Kepala Sekolah MTsN Andalan Pekanbaru, H Mayuki Hag menjelaskan, hingga kemarin ia belum mendapatkan surat edaran resmi dari Disdik Pekanbaru. Dengan begitu proses belajar-mengajar tetap berjalan dengan memakai masker.

"Kita terima instruksi untuk meliburkan sekolah, jadi kita masih belajar pakai masker," ujar Marzuki kepada Riau Pos, kemarin.

## Rekomendasi Dinas

Kesehatan Adapun rekomendasi untuk meliburkan sekolah itu disampaikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zainal Arifin mengatakan, rekomendasi itu disampaikan guna meminimalkan terjadinya peningkatan kasus penyakit karena kabut asap.

"Ya kalau untuk penerapannya bukan kewenangan kita. Itu tergantung keputusan Dinas Pendidikan kabupaten/kota. Yang jelas untuk rekomendasi, kita usulkan agar meliburkan siswa sampai kondisi normal," ujarnya kepada Riau Pos, kemarin, dan pihak-pihak terkait.

Di bagian lain, Pelaksana tugas (Plt) Kadisdis Riau, Hadimiharja mengimbau sekolah yang terkena dampak asap menghentikan aktivitas di luar sekolah. Jika kondisi terus berubah, maka pihak Disdik kab/kota dapat menginstruksikan anak dalam proses belajar-mengajar. (gus/eka/egp/ah/ilo/fat/\*3/\*4)

## Udara Riau Sangat Tak Sehat

## Sumbangan dari hal. 1

beberapa daerah seperti Pangkajene, IPU sudah mencapai 222 atau dikategorikan sangat tidak sehat," ungkap Kepala Pusat Pengkajian Ekologi Sumatera, Ir M Ilham Malik MS.

ISPU ditetapkan berdasarkan 5 parameter utama, yaitu CO, SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub>, O<sub>3</sub> dan partikulat (PM<sub>10</sub>). "Namun biasanya kalau sudah melewati indikator, parameter, dan biasanya CO maupun yang lainnya sudah dibatas normal," jelasnya.

Di Pekanbaru, menurut dia, ISPU mencapai 171 atau kategori tidak sehat. Jika dilihat secara umum, kondisi udara di Riau kemarin, kata Ilham, memang sudah di ambang batas normal.

Ilham menjelaskan, ISPU memiliki lima tingkatan. Sedangkan kondisi udara di daerah Riau saat ini, sudah masuk tingkatan keempat atau tingkatan sangat tidak sehat dengan nilai ISPU 200-299. "Tapi belum masuk tingkatan berbahaya itu di atas 300," jelasnya.

Dikatakan dia, udara baik ISPU menunjukkan angka 0-50 tingkat kualitas udara yang tidak memberikan efek bagi kesehatan manusia atau hewan dan tidak berpengaruh pada tumbuhan, hewan atau nilai estetika.

Sedang 51-100 tingkat kualitas udara yang tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif dan nilai estetika. Kondisi udara tidak sehat 101-199. Tingkat ini, kualitas

udara yang bersifat merugikan pada manusia ataupun kelompok hewan yang sensitif atau bias menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika.

Seperti di Riau dengan kabut tebal, atau dengan kondisi sangat tidak sehat dengan nilai ISPU 200-299. Dengan artian kualitas udara yang dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi. "Alhamdulillah belum masuk tingkat berbahaya. Tingkat kualitas udara berbahaya yang secara umum dapat merugikan kesehatan yang serius pada populasi," lanjut Ilham.

Terpapar 575 Hot Spot Jumlah hot spot di Provinsi Riau cukup fantastis terpantau melalui satelit NOAA 18, Rabu (28/8). Pada monitoring sekitar pukul 05.00 WIB, sebanyak 575 hot spot terpantau mengepung Provinsi Riau. Sedangkan pulau Sumatera terpantau 720 hot spot.

Kepala Kantor Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pekanbaru, Ferry Sitorus melalui Staf Analisa Slamet Riyadi menyebutkan, jumlah 575 titik itu merupakan hasil pantauan pagi. "Dari dua kali monitoring, pagi pukul 05.00 WIB dan petang pukul 17.00 WIB, di pagi ini termonitor 575 titik panas," kata Slamet.

Dari 575 titik itu, terdapat 10 di kabupaten/kota, Pekanbaru dan Kepulauan Meranti sama sekali tidak terpantau. Pelatawan kembali menjadi penyumbang terbanyak 305 titik, berikutnya di Rokan Hilir 16 titik, Rokan Hulu 10 titik, Dumai 4 titik, Bengkalis

14 titik, Siak 12 titik, Kampar 48 titik, Indragiri Hulu 3 titik, Indragiri Hilir 25 titik dan Kuantan Singingi 44 titik. Jumlah ini naik 255 titik dari hari sebelumnya yang mencapai 320 titik. Tapi untuk pantauan ini tidak terpantau. Namun hari ini, pantauan juga saja mengenai hasil monitoring Kamis (29/8) pagi bisa diketahui akan terus bertambah," jelas Slamet.

Dari data BMKG, pantauan kemarin tertinggi adalah Agustus. Sedangkan tertinggi terjadi 4 Agustus kemarin, 258 titik.

Data tersebut dirilis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Rabu (28/8) malam, BNPB hanya mencatat 27 titik. Angka ini turun drastis dibanding pantauan hot spot pagi seperti dirilis BMKG Pekanbaru. Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB, Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, untuk Sumatera jumlah titik api juga turun drastis. Di Sumatera terpantau 69 hot spot, 39 titik di Riau," katanya, malam tadi.

Untuk pengurangan Karbon di Riau, Sutopo menyebutkan, kemarin BPED dilindungi BNPB Riau telah melakukan operasi pemompaan air hujan buatan, dan operasi pemadaman listrik. "Hari ini kemarin sudah dilakukan operasi pemadaman listrik dengan 1 helikopter Sikorsky yang mampu mengangkut 2.000 liter air sekali terbang," ujarnya.

Gangguan Penerbangan Kabut asap tebal kemarin sempat membuat jarak pandang hanya 300 meter. Jadwal penerba-

gan di Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II pun kacau.

Satu penerbangan Mandala Tiger Jakarta-Pekanbaru terpaksa mengalihkan pendaratan (divert) ke Bandara Kudatama, Medan. Satu penerbangan Silk Air terpaksa kembali pulang ke Singapura. Sementara enam penerbangan lain delay yakni Garuda Indonesia tujau Jakarta-Pekanbaru, Lion Air Jakarta-Pekanbaru, Air Asia Medan-Pekanbaru, Air Asia Bandung-Pekanbaru, Sriwijaya Batam-Pekanbaru dan Mandala Tiger Jogjakarta-Pekanbaru.

Selanjutnya ada penerbangan rute "Kondisinya masih seperti sebelumnya, ada yang divert, ada yang delay di Bandara asal yang menunda penerbangan ke Pekanbaru. Namun kali ini ada satu penerbangan luar negeri yang kembali lagi dan membuat jadwal penerbangan kacau," ujar Airport Duty Manager PT AP II Bandara SSK II Pekanbaru, Bakuni (gus/egp/ah/ilo/fat/\*3/\*4).

## Sumbangan dari hal. 1

ke suya, jadi saya minta tolong ke PLN Tolong dong solusinya," pinta Ayat.

Divont-kan Ayat, saat PON XVII lalu, PLN bisa tidak padam selama 100 hari. Tentu hal seperti ini harus bisa dilakukan lagi. "Saya memang sudah sering sampai ke kawasan-kawasan di PLN untuk perbaikan pelayanan. Tapi alangnya lebih air. Tentu selanjutnya pihak PLN yang tahu bagaimana solusinya, usahanya tidak berjalan sejak pemadaman bergilir. "Kan sudah kalau listrik padam, semesta banyak yang datang minta bantuan untuk difotokopi. Lebih baik tutup, jadi tidak terlalu sakit hati," lanjut Rori.

Meski kondisi listrik yang sudah semakin parah, Ombudsman RI Perwakilan Riau belum menerima laporan pengaduan apapun dari masyarakat. Hal ini dikatakan Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Riau, Ah-

## PLN Harus Carikan Solusi

mad Fitri. Kendati demikian, pelayanan publik yang tergolong senal tersebut perlu mendapatkan perhatian ekstra.

Tunggu Pembangkit Baru Di bagian lain, PLN WRKR hanya bisa menunggu berapanya daya pembangkit baru yakni PLTU Sirih di Sumbar dan PLTU MG Balai Pungut, Duri untuk mengatasi kekurangan pasokan daya di sistem Riau.

Kondisi itu diakui Manager Teknik PLN WRKR, Pinar Hutapea bersama Deputi Manager Bidang Komunikasi dan Hukum, Syairul. Keduanya mengatakan, pembangkit Teluk Sirih 110 MW di Bungus, Sumbar akan beroperasi 10 September mendatang. Sementara Pembangkit Ombilin Unit 1 100 MW diperkirakan beroperasi Oktober.

"Kami masih berharap beberapa pembangkit baru seperti Teluk Sirih dan Balai Pungut beroperasi sehingga ada tambahan daya ke sistem," kata Syairul (rio/rii/gus/\*4).

## Selamat Ulang Tahun



RS AWAL BROS  
Pekanbaru

15 tahun sudah RS Awal Bros berdiri, tidak sedikit pula halangan dan rintangan yang dihadapi, namun semua itu justru membuat rumah sakit menjadi lebih baik dan dewasa, terbukti sejak di tahun 2002 RS Awal Bros mendapatkan sertifikasi ISO dan tahun 2006 mendapatkan sertifikasi DEPKES dengan 16 Pelayanan serta penghargaan lainnya. Selain itu juga pernah mendapatkan penghargaan dari MARPOLUS yaitu Indonesia Service To Care Champion 2013. Hingga genap 15 tahun berdiri selanjutnya RS Awal Bros akan mencapai sertifikasi JCI. Kini bertamailah RS Awal Bros Pekanbaru tetap menjadi Rumah Sakit rujukan Se-Sumatra.

One Step Ahead to JCI

15 Tahun

RS AWAL BROS

Penuh Warna

29 Agustus 1998 - 29 Agustus 2013

Dari :

Riau Pos  
TERBESAR, TERDEPAN, PERTAMA DI BACA

## Anugerah Sagang 2013

YAYASAN SAGANG tahun 2013 ini kembali akan memberikan Anugerah untuk Seniman/Budayawan Pilihan, Buku Pilihan, Karya Non-Buku Pilihan, Institut/Lembaga Seni-Budaya Pilihan, Seniman/Budayawan Serantau Pilihan, Karya Jurnalistik Budaya Pilihan, dan Karya Penelitian Budaya Pilihan. Bersamaan dengan ini kami menjemput Tuan dan Puan untuk berpartisipasi ikut mengusulkan calon dengan kriteria sebagai berikut:

I. Seniman/Budayawan Pilihan Sagang  
1. Berdomisili di daerah Riau  
2. Memiliki karya yang dapat diandalkan (berkualitas)  
3. Memiliki karya yang berpengaruh  
4. Memiliki catatan prestasi sebagai seniman/budayawan  
5. Mengirimkan biodata riwayat hidup. Khususnya sebagai seniman b, dayawan

II. Buku Pilihan Sagang  
1. Penulis berdomisili di Riau  
2. Berupa buku sastra maupun buku yang membahas tentang seni budaya Melayu, ditamalkan di Riau  
3. Mengirimkan biodata riwayat hidup. Khususnya sebagai penulis

III. Karya Non-buku Pilihan Sagang  
1. Karya seniman/budayawan yang berdomisili di Riau  
2. Karya berbudaya dengan seni budaya Melayu, ditamalkan di Riau  
3. Bentuk karya berupa karya musik (dalam bentuk pita kaset atau, piringan VCD/CD, MP3, MP4, MP5, MP6, MP7, MP8, MP9, MP10, MP11, MP12, MP13, MP14, MP15, MP16, MP17, MP18, MP19, MP20, MP21, MP22, MP23, MP24, MP25, MP26, MP27, MP28, MP29, MP30, MP31, MP32, MP33, MP34, MP35, MP36, MP37, MP38, MP39, MP40, MP41, MP42, MP43, MP44, MP45, MP46, MP47, MP48, MP49, MP50, MP51, MP52, MP53, MP54, MP55, MP56, MP57, MP58, MP59, MP60, MP61, MP62, MP63, MP64, MP65, MP66, MP67, MP68, MP69, MP70, MP71, MP72, MP73, MP74, MP75, MP76, MP77, MP78, MP79, MP80, MP81, MP82, MP83, MP84, MP85, MP86, MP87, MP88, MP89, MP90, MP91, MP92, MP93, MP94, MP95, MP96, MP97, MP98, MP99, MP100, MP101, MP102, MP103, MP104, MP105, MP106, MP107, MP108, MP109, MP110, MP111, MP112, MP113, MP114, MP115, MP116, MP117, MP118, MP119, MP120, MP121, MP122, MP123, MP124, MP125, MP126, MP127, MP128, MP129, MP130, MP131, MP132, MP133, MP134, MP135, MP136, MP137, MP138, MP139, MP140, MP141, MP142, MP143, MP144, MP145, MP146, MP147, MP148, MP149, MP150, MP151, MP152, MP153, MP154, MP155, MP156, MP157, MP158, MP159, MP160, MP161, MP162, MP163, MP164, MP165, MP166, MP167, MP168, MP169, MP170, MP171, MP172, MP173, MP174, MP175, MP176, MP177, MP178, MP179, MP180, MP181, MP182, MP183, MP184, MP185, MP186, MP187, MP188, MP189, MP190, MP191, MP192, MP193, MP194, MP195, MP196, MP197, MP198, MP199, MP200, MP201, MP202, MP203, MP204, MP205, MP206, MP207, MP208, MP209, MP210, MP211, MP212, MP213, MP214, MP215, MP216, MP217, MP218, MP219, MP220, MP221, MP222, MP223, MP224, MP225, MP226, MP227, MP228, MP229, MP230, MP231, MP232, MP233, MP234, MP235, MP236, MP237, MP238, MP239, MP240, MP241, MP242, MP243, MP244, MP245, MP246, MP247, MP248, MP249, MP250, MP251, MP252, MP253, MP254, MP255, MP256, MP257, MP258, MP259, MP260, MP261, MP262, MP263, MP264, MP265, MP266, MP267, MP268, MP269, MP270, MP271, MP272, MP273, MP274, MP275, MP276, MP277, MP278, MP279, MP280, MP281, MP282, MP283, MP284, MP285, MP286, MP287, MP288, MP289, MP290, MP291, MP292, MP293, MP294, MP295, MP296, MP297, MP298, MP299, MP300, MP301, MP302, MP303, MP304, MP305, MP306, MP307, MP308, MP309, MP310, MP311, MP312, MP313, MP314, MP315, MP316, MP317, MP318, MP319, MP320, MP321, MP322, MP323, MP324, MP325, MP326, MP327, MP328, MP329, MP330, MP331, MP332, MP333, MP334, MP335, MP336, MP337, MP338, MP339, MP340, MP341, MP342, MP343, MP344, MP345, MP346, MP347, MP348, MP349, MP350, MP351, MP352, MP353, MP354, MP355, MP356, MP357, MP358, MP359, MP360, MP361, MP362, MP363, MP364, MP365, MP366, MP367, MP368, MP369, MP370, MP371, MP372, MP373, MP374, MP375, MP376, MP377, MP378, MP379, MP380, MP381, MP382, MP383, MP384, MP385, MP386, MP387, MP388, MP389, MP390, MP391, MP392, MP393, MP394, MP395, MP396, MP397, MP398, MP399, MP400, MP401, MP402, MP403, MP404, MP405, MP406, MP407, MP408, MP409, MP410, MP411, MP412, MP413, MP414, MP415, MP416, MP417, MP418, MP419, MP420, MP421, MP422, MP423, MP424, MP425, MP426, MP427, MP428, MP429, MP430, MP431, MP432, MP433, MP434, MP435, MP436, MP437, MP438, MP439, MP440, MP441, MP442, MP443, MP444, MP445, MP446, MP447, MP448, MP449, MP450, MP451, MP452, MP453, MP454, MP455, MP456, MP457, MP458, MP459, MP460, MP461, MP462, MP463, MP464, MP465, MP466, MP467, MP468, MP469, MP470, MP471, MP472, MP473, MP474, MP475, MP476, MP477, MP478, MP479, MP480, MP481, MP482, MP483, MP484, MP485, MP486, MP487, MP488, MP489, MP490, MP491, MP492, MP493, MP494, MP495, MP496, MP497, MP498, MP499, MP500, MP501, MP502, MP503, MP504, MP505, MP506, MP507, MP508, MP509, MP510, MP511, MP512, MP513, MP514, MP515, MP516, MP517, MP518, MP519, MP520, MP521, MP522, MP523, MP524, MP525, MP526, MP527, MP528, MP529, MP530, MP531, MP532, MP533, MP534, MP535, MP536, MP537, MP538, MP539, MP540, MP541, MP542, MP543, MP544, MP545, MP546, MP547, MP548, MP549, MP550, MP551, MP552, MP553, MP554, MP555, MP556, MP557, MP558, MP559, MP560, MP561, MP562, MP563, MP564, MP565, MP566, MP567, MP568, MP569, MP570, MP571, MP572, MP573, MP574, MP575, MP576, MP577, MP578, MP579, MP580, MP581, MP582, MP583, MP584, MP585, MP586, MP587, MP588, MP589, MP590, MP591, MP592, MP593, MP594, MP595, MP596, MP597, MP598, MP599, MP600, MP601, MP602, MP603, MP604, MP605, MP606, MP607, MP608, MP609, MP610, MP611, MP612, MP613, MP614, MP615, MP616, MP617, MP618, MP619, MP620, MP621, MP622, MP623, MP624, MP625, MP626, MP627, MP628, MP629, MP630, MP631, MP632, MP633, MP634, MP635, MP636, MP637, MP638, MP639, MP640, MP641, MP642, MP643, MP644, MP645, MP646, MP647, MP648, MP649, MP650, MP651, MP652, MP653, MP654, MP655, MP656, MP657, MP658, MP659, MP660, MP661, MP662, MP663, MP664, MP665, MP666, MP667, MP668, MP669, MP670, MP671, MP672, MP673, MP674, MP675, MP676, MP677, MP678, MP679, MP680, MP681, MP682, MP683, MP684, MP685, MP686, MP687, MP688, MP689, MP690, MP691, MP692, MP693, MP694, MP695, MP696, MP697, MP698, MP699, MP700, MP701, MP702, MP703, MP704, MP705, MP706, MP707, MP708, MP709, MP710, MP711, MP712, MP713, MP714, MP715, MP716, MP717, MP718, MP719, MP720, MP721, MP722, MP723, MP724, MP725, MP726, MP727, MP728, MP729, MP730, MP731, MP732, MP733, MP734, MP735, MP736, MP737, MP738, MP739, MP740, MP741, MP742, MP743, MP744, MP745, MP746, MP747, MP748, MP749, MP750, MP751, MP752, MP753, MP754, MP755, MP756, MP757, MP758, MP759, MP760, MP761, MP762, MP763, MP764, MP765, MP766, MP767, MP768, MP769, MP770, MP771, MP772, MP773, MP774, MP775, MP776, MP777, MP778, MP779, MP780, MP781, MP782, MP783, MP784, MP785, MP786, MP787, MP788, MP789, MP790, MP791, MP792, MP793, MP794, MP795, MP796, MP797, MP798, MP799, MP800, MP801, MP802, MP803, MP804, MP805, MP806, MP807, MP808, MP809, MP810, MP811, MP812, MP813, MP814, MP815, MP816, MP817, MP818, MP819, MP820, MP821, MP822, MP823, MP824, MP825, MP826, MP827, MP828, MP829, MP830, MP831, MP832, MP833, MP834, MP835, MP836, MP837, MP838, MP839, MP840, MP841, MP842, MP843, MP844, MP845, MP846, MP847, MP848, MP849, MP850, MP851, MP852, MP853, MP854, MP855, MP856, MP857, MP858, MP859, MP860, MP861, MP862, MP863, MP864, MP865, MP866, MP867, MP868, MP869, MP870, MP871, MP872, MP873, MP874, MP875, MP876, MP877, MP878, MP879, MP880, MP881, MP882, MP883, MP884, MP885, MP886, MP887, MP888, MP889, MP890, MP891, MP892, MP893, MP894, MP895, MP896, MP897, MP898, MP899, MP900, MP901, MP902, MP903, MP904, MP905, MP906, MP907, MP908, MP909, MP910, MP911, MP912, MP913, MP914, MP915, MP916, MP917, MP918, MP919, MP920, MP921, MP922, MP923, MP924, MP925, MP926, MP927, MP928, MP929, MP930, MP931, MP932, MP933, MP934, MP935, MP936, MP937, MP938, MP939, MP940, MP941, MP942, MP943, MP944, MP945, MP946, MP947, MP948, MP949, MP950, MP951, MP952, MP953, MP954, MP955, MP956, MP957, MP958, MP959, MP960, MP961, MP962, MP963, MP964, MP965, MP966, MP967, MP968, MP969, MP970, MP971, MP972, MP973, MP974, MP975, MP976, MP977, MP978, MP979, MP980, MP981, MP982, MP983, MP984, MP985, MP986, MP987, MP988, MP989, MP990, MP991, MP992, MP993, MP994, MP995, MP996, MP997, MP998, MP999, MP1000, MP1001, MP1002, MP1003, MP1004, MP1005, MP1006, MP1007, MP1008, MP1009, MP1010, MP1011, MP1012, MP1013, MP1014, MP1015, MP1016, MP1017, MP1018, MP1019, MP1020, MP1021, MP1022, MP1023, MP1024, MP1025, MP1026, MP1027, MP1028, MP1029, MP1030, MP1031, MP1032, MP1033, MP1034, MP1035, MP1036, MP1037, MP1038, MP1039, MP1040, MP1041, MP1042, MP1043, MP1044, MP1045, MP1046, MP1047, MP1048, MP1049, MP1050, MP1051, MP1052, MP1053, MP1054, MP1055, MP1056, MP1057, MP1058, MP1059, MP1060, MP1061, MP1062, MP1063, MP1064, MP1065, MP1066, MP1067, MP1068, MP1069, MP1070, MP1071, MP1072, MP1073, MP1074, MP1075, MP1076, MP1077, MP1078, MP1079, MP1080, MP1081, MP1082, MP1083, MP1084, MP1085, MP1086, MP1087, MP1088, MP1089, MP1090, MP1091, MP1092, MP1093, MP1094, MP1095, MP1096, MP1097, MP1098, MP1099, MP1100, MP1101, MP1102, MP1103, MP1104, MP1105, MP1106, MP1107, MP1108, MP1109, MP1110, MP1111, MP1112, MP1113, MP1114, MP1115, MP1116, MP1117, MP1118, MP1119, MP1120, MP1121, MP1122, MP1123, MP1124, MP1125, MP1126, MP1127, MP1128, MP1129, MP1130, MP1131, MP1132, MP1133, MP1134, MP1135, MP1136, MP1137, MP1138, MP1139, MP1140, MP1141, MP1142, MP1143, MP1144, MP1145, MP1146, MP1147, MP1148, MP1149, MP1150, MP1151, MP1152, MP1153, MP1154, MP1155, MP1156, MP1157, MP1158, MP1159, MP1160, MP1161, MP1162, MP1163, MP1164, MP1165, MP1166, MP1167, MP1168, MP1169, MP1170, MP1171, MP1172, MP1173, MP1174, MP1175, MP1176, MP1177, MP1178, MP1179, MP1180, MP1181, MP1182, MP1183, MP1184, MP1185, MP1186, MP1187, MP1188, MP1189, MP1190, MP1191, MP1192, MP1193, MP1194, MP1195, MP1196, MP1197, MP1198, MP1199, MP1200, MP





**Hubungi Marketing:**  
 ■ 0812 7051 8022  
 ■ 0823 8751 6210  
 ■ 0812 6876 4478  
 ■ 0813 7888 0009  
 ■ 0852 6559 6868

# Cagubri Dituntut Peduli

**THE SAMEDAY SERVICE** | **CHAMPION ON COURIER SERVICE | Pekanbaru Service Excellent Award (PkSEA) 2012** | **TERKIRIM DI HARI YANG SAMA**  
 **2012** | *Kami adalah sebuah kecepatan dan ketepatan untuk Anda..* |  **TIKI**  
[www.tiki-online.com](http://www.tiki-online.com)  
 TIKI RIAU | @TIKI\_RIAU | tikiriau@gmail.com | SMS: 0819 5955 5656 | 2183AA47 | SELALU TELPON KAMI: **(0761) 56 56 56**  
 Agen Utama Pekanbaru : Jl. Rambutan II No. 17 Telp. (0761) 565656, Fax. 0761-561620 | Konter Utama Pekanbaru : Jl. Teuku Umar No. 23 | KCP Rumbat : Jl. Sembilang No. 135



